

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi pada Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

YUNIA DANIATI
NIM. 145030101111115



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG

2018

MOTTO

*Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi satu satu
kegagalan ke gagalannya berikutnya tanpa kehilangan semangat.*

(Wiston Churchill)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Mulyosari,
Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung)

Disusun Oleh : Yulia Daniati

NIM : 145030101111115

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 24 Mei 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M.PA
NIP. 1974067403 200501 1 001

Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA
NIP. 201107 850421 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung)"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 15 Mei 2018



Yunia Daniati
145030101111115

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Juli 2018

Waktu : 12.00 – 13.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Yunia Daniati

Judul : Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M.PA
NIP. 1974067403 200501 1 001


Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA
NIP. 201107 850421 1 001

Anggota

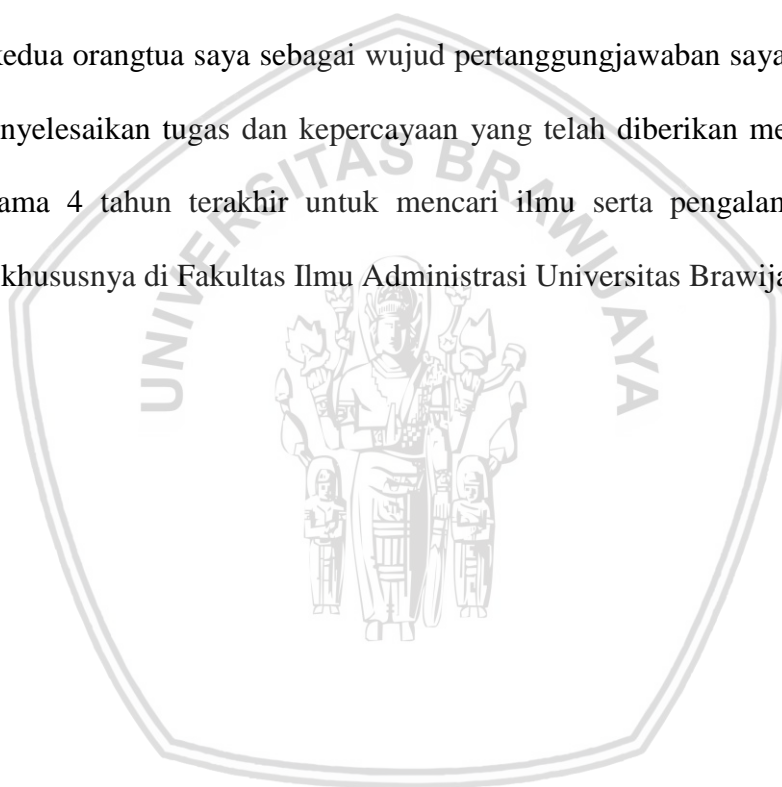
Anggota


Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001


Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D
NIP. 19851110 201012 2 006

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua sosok inspirasi dan sumber semangat saya, yaitu Bapak Slamet dan Ibu Supriati. Keduanya yang selalu berusaha bekerja keras, selalu ada dalam berbagai kondisi, dan selalu mendoakan yang terbaik bagi saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya sebagai wujud pertanggungjawaban saya bahwa saya telah menyelesaikan tugas dan kepercayaan yang telah diberikan mereka kepada saya selama 4 tahun terakhir untuk mencari ilmu serta pengalaman di Kota Malang, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



RINGKASAN

Yunia Daniati, 2018, **Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat** (Studi pada Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung). Dosen Pembimbing: Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, MPA dan Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA, hal: 137

Program Desa Mandiri Energi merupakan salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan agar masyarakat lebih berdaya untuk kebutuhan sehari-hari. Melihat hal tersebut di Tulungagung termasuk di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo dinilai masih perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung melaksanakan Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Instrumen penelitian yang di gunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam, dan kamera. Analisis data dalam penelitian ini adalah model pengkodean Creswell.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, dilihat sudah ada 102 KK yang menggunakan biogas. Adanya Program Desa Mandiri Energi diharapkan masyarakat Desa Mulyosari dapat memberdayakan dirinya sendiri pada aspek kebutuhan sehari-hari, meningkatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Biogas digunakan masyarakat untuk memasak dan sebagai lampu penerangan. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pengembangan biogas di Desa Mulyosari agar sumberdaya alam yaitu kotoran ternak bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Faktor pendukung adalah sosialisasi mendalam, komunikasi antar *stakeholder*, dan pengawasan yang berkala. Faktor penghambat adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman masyarakat.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu perlunya administrasi yang jelas seperti Perda atau Perbub tentang Program Desa Mandiri Energi, meningkatkan kerjasama dari pihak luar bisa swasta atau perguruan tinggi, perlunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk masalah anggaran, harus tetap berkoordinasi lebih lanjut agar masyarakat paham mengenai biogas.

Kata Kunci: Implementasi Program, Desa Mandiri Energi, Pemberdayaan Masyarakat

SUMMARY

Yunia Daniati, 2018, **Implementation of the Energy Reliance Village Program Based on Community Empowerment** (Studi in Mulyosari Village, Pagerwojo Sub-district, Tulungagung Regency). Advisors: Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, MPA dan Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA, p. 137

The Energy Reliance Village Program one of the programs from Tulungagung District through Community and Village Empowerment Agency with the aim of prospering the community, reducing poverty, environmental pollution, and the community more powerless for daily needs. Seeing that in Tulungagung including Mulyosari Village Pagerwojo District is still considered necessary to improve community empowerment on economic, social and environmental aspects. Based on that, Mulyosari Village, Pagerwojo Sub-district, Tulungagung District implemented of a Energy Independent Village Program based on community empowerment.

The research aims to determine the implementation of Energy Reliance Village Program based on community empowerment and supporting factors and inhibiting factors. The research used qualitative descriptive research. The location of the this research is Mulyosari Village Pagerwojo Sub-District Tulungagung Regency. Technique of data collecting is done by documentation method, interview and observation, instrument used is researcher self, interview guide, note book, recorder and camera. Data analyzed used in this research is coding Cresswell.

The results showed that the implemented of a Energy Reliance Village Program based on community empowerment good enough, there are already 102 households using biogas. The existence of Reliance Energy Village Program is expected Mulyosari Village community can empower themselves on aspects of daily needs, improve the economic, social, and environmental aspects. Biogas is used by society for cooking and as lighting lamp. The role of local government is needed in the development of biogas in the Village Mulyosari for natural resources ie cattle dung can be utilized with as much as possible. Supporting factors are in-depth socialization, inter-stakeholder communication, and regular monitoring. Inhibiting factors are Community Manipulation and the lack of availability of biogas units.

Suggestions that can be given by the the researchers that the need for guidance to increase public participation, the need for training on the manufacture of biogas installations, and the need for modern tools in the manufacture of biogas installations.

Keywords: Program Implementation, Energy Reliance Village, Community Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyesuaikan masa belajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan telah berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.PA dan Bapak Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, selalu memberikan arahan dan masukan untuk skripsi hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Untuk keluarga yang sangat saya banggakan yaitu Bapak Slamet, Ibunda Supriati, dan Kakak Ardi Prasetyo, S.Pd yang sangat saya cintai dan yang memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
8. Sahabat-sahabatku Bahagia Nastiti, Zumrotus Sholikhah, Diah Fitriani, Nadia Tiara Nanda, serta Nia Dwi Martanti yang selalu menemani penulis mulai dari maba hingga penulis menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung serta Kepala Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung atas kantuan dan kerjasamanya dalam memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan peneliti.
10. Seluruh masyarakat pengguna biogas Desa Mulyosar Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung yang sudah meluangkan waktu dan membantu dalam memberikan informasi kepada penulis.

11. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2014, teman-teman Program Studi Administrasi Publik angkatan 2014 atas kebersamaannya selama ini, memberikan dukungan dan semangat pada penulis.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Malang, 25 Juni 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| MOTTO | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | vi |
| RINGKASAN | vii |
| SUMMARY | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Kontribusi Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Administrasi Publik..... | 14 |
| B. Pembangunan | 15 |
| 1) Konsep Pembangunan | 15 |
| 2) Pembangunan Berpusat Pada Masyarakat (<i>People Centered Devolepment</i>) | 17 |
| C. Kebijakan Publik | 20 |
| 1) Pengertian Kebijakan Publik..... | 20 |
| 2) Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik..... | 22 |
| D. Implementasi Kebijakan | 26 |
| 1) Pengertian Implementasi Kebijakan..... | 26 |
| 2) Pendekatan Implementasi Kebijakan | 32 |
| 3) Pendekatan Top-Down, Bottom-up, dan Hybrid Model | 34 |
| 4) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi | 37 |
| E. Pemberdayaan Masyarakat | 41 |
| 1) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat..... | 41 |
| 2) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat | 44 |
| 3) Indikator Pemberdayaan Masyarakat..... | 45 |
| F. Desa Mandiri Energi | 46 |
| 1) Pengertian Desa Mnadiri Energi..... | 46 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 2) Energi Berkelanjutan | 49 |
| 3) Biogas | 51 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian | 53 |
| B. Fokus Penelitian | 54 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian | 56 |
| D. Sumber Data | 57 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 59 |
| F. Instrumen Penelitian | 61 |
| G. Metode dan Analisis Data | 63 |
| H. Uji Keabsahan Hasil Penelitian | 64 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung | 68 |
| B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 71 |
| C. Gambaran Umum Desa Mulyosari | 75 |
| D. Penyajian Data | 78 |
| 1. Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | 78 |
| a. Organisasi | 81 |
| b. Interpretasi | 84 |
| c. Aplikasi | 91 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat | 102 |
| a. Faktor Pendukung | 102 |
| b. Faktor Penghambat | 107 |
| E. Pembahasan | 110 |
| 1. Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | 110 |
| a. Organisasi | 111 |
| b. Interpretasi | 114 |
| c. Aplikasi | 116 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat | 118 |
| a. Faktor Pendukung | 118 |
| b. Faktor Penghambat | 121 |

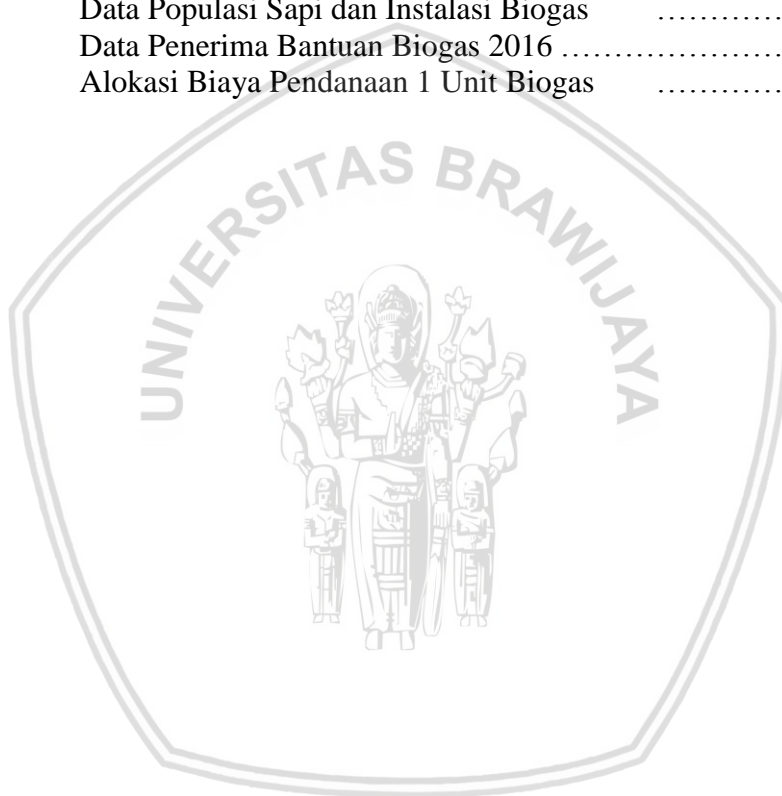
BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 123 |
| B. Saran | 125 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 126 |
| LAMPIRAN | 130 |

DAFTAR TABEL

| No | Judul | Halaman |
|---------|---|---------|
| Tabel 1 | Jenis Ternak di Desa Mulyosari | 6 |
| Tabel 2 | Jumlah Pengguna Biogas Tahun 2014-2017 | 8 |
| Tabel 3 | Data Peternak di Desa Mulyosari | 86 |
| Tabel 4 | Data Jumlah Ternak dan Peternak Sapi Desa Mulyosari | 89 |
| Tabel 5 | Data Jumlah Pengguna Biogas 2017 | 92 |
| Tabel 6 | Data Populasi Sapi dan Instalasi Biogas | 93 |
| Tabel 7 | Data Penerima Bantuan Biogas 2016 | 93 |
| Tabel 8 | Alokasi Biaya Pendanaan 1 Unit Biogas | 96 |



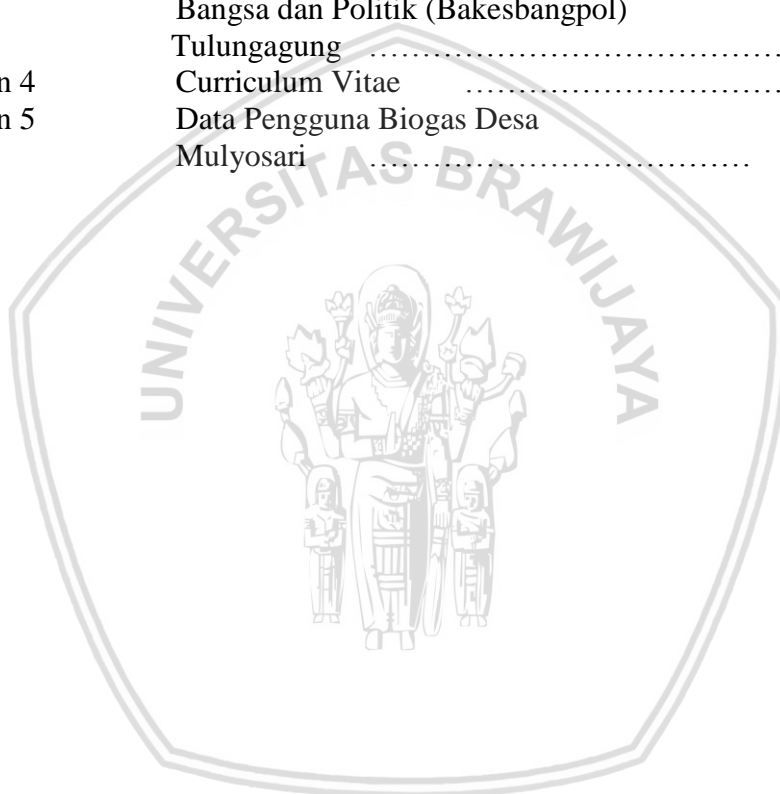
DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Halaman |
|-----------|---|----------------|
| Gambar 1 | Proses Kebijakan Publik..... | 24 |
| Gambar 2 | Peta Kabupaten Tulungagung | 68 |
| Gambar 3 | Struktur Organisasi Dinas PMD..... | 75 |
| Gambar 4 | Peta Kecamatan Pagerwojo | 77 |
| Gambar 5 | Serah Terima Bantuan Biogas | 97 |
| Gambar 6 | Instalasi Biogas..... | 100 |
| Gambar 7 | Manfaat Biogas untuk Penerangan dan memasak.... | 101 |
| Gambar 8 | Kegiatan Sosialisasi Biogas..... | 104 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul | Halaman |
|------------|--|---------|
| Lampiran 1 | Interview Guide | 130 |
| Lampiran 2 | Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung | 132 |
| Lampiran 3 | Surat Riset/Survey untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tulungagung | 133 |
| Lampiran 4 | Curriculum Vitae | 134 |
| Lampiran 5 | Data Pengguna Biogas Desa Mulyosari | 135 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini merupakan negara berkembang dan salah satu permasalahan yang terdapat pada setiap negara berkembang adalah kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan maka akan mempengaruhi tujuan dan cita-cita negara yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya suatu inovasi pembangunan agar bisa mengatasi kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana (Ginjar Kartasmita, 1994) untuk pencapaian hasil yaitu suatu perubahan yang dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan yang bisa membawa kemajuan. Proses perubahan yang dimaksudkan adalah secara menyeluruh yang mencakup dari beragam aspek dan tatanan kehidupan di masyarakat. Untuk bisa mencapai hal-hal tersebut maka perlu adanya inovasi dalam hal teknologi, benda atau barang baru, atau gagasan yang baru, dan pengorganisasian. Didalam suatu pembangunan tidaklah harus berbentuk infrastruktur tetapi juga bisa berbentuk suatu program yang diharapkan bisa merubah tatanan kehidupan masyarakat dimasa mendatang.

“Dalam konsep pembangunan juga di kenal istilah pemberdayaan masyarakat yang berasal dari kata *empowerment*. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk

berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya” (Mardikanto, 2012:28)

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan model penanggulangan kemiskinan yang melibatkan langsung masyarakat dalam prosesnya. Tujuan utama dengan dilakukannya pemberdayaan yaitu untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat lebih mandiri dan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui tindakan mereka sendiri dan untuk diri mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini, merupakan suatu langkah sebagai upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang di berdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui aktivitas seperti mengikutsertakan diri pada program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 258 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa

- (1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-undang diatas pemerintah Kabupaten Tulungagung meluncurkan program Desa Mandiri Energi (DME). Program desa mandiri ada karena merujuk dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 Ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan “. Selanjutnya di jabarkan oleh Permen PDPTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Dari situ lah pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat program Desa Mandiri Energi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan agar masyarakat lebih berdaya dengan adanya program ini. Karena program desa mandiri energi merupakan trobosan baru dari suatu pembangunan di kawasan pedesaan. Dimana pembangunan tidak hanya berupa fisik ataupun infrastruktur tetapi juga harus ada inovasi pembangunan jangka panjang.

Program desa mandiri energi merupakan konsep baru yang sedang dikembangkan di Indonesia. Pengembangan desa mandiri energi berdasar pada usaha menuju swasembada energi dalam arti mencukupi kebutuhan energi di desa itu, tanpa harus mengimpor sumber energi dari luar. Konsep desa mandiri energi itu sendiri dilakukan dengan melihat potensi desa, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengamatan terhadap potensi lingkungan dan karakteristiknya sangatlah penting.

Pengembangan Program Desa Mandiri Energi berkonsep pada konsep partisipatif yang melibatkan semua *stakeholder* dari pemerintah dan masyarakat maupun lini-lini yang terkait di dalamnya.

Menurut Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2013 tentang perubahan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain, menyatakan bahwa

“Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (*Biofel*) sebagai bahan bakar lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri” .

Sejalan dengan itu, bisa diartikan bahwa Desa Mandiri Energi adalah desa dimana masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumberdaya setempat. Energi Terbarukan adalah energi yang pada umumnya merupakan sumberdaya non fosil yang dapat diperbaharui dan apabila dikelola dengan baik maka sumberdaya nya tidak akan habis. Energi terbarukan yang dimanfaatkan haruslah memiliki syarat yang mencakup aspek berkelanjutan, regional development, dan ramah lingkungan.

Selain bertujuan untuk meningkatkan potensi alam yang ada, dari segi ekonomi program desa mandiri energi juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Sedangkan tujuan utama pengembangan desa mandiri energi

adalah mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan untuk mensubsidi bahan bakar minyak. Di sisi lain, pengembangan desa mandiri energi harus mencakup aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan atau kapasitas masyarakat agar dapat mendayagunakan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan keberdayaan. Proses ini dilakukan dalam bentuk partisipasi masyarakat, pembangunan pedesaan secara berkelanjutan, penguatan usaha kecil dan menengah, dan pengembangan prasarana berbasis masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan desa mandiri energi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat dengan tujuan program desa mandiri energi dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Menurut Widaningsih (2014) dalam sebuah Jurnal Ilmiah yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Melalui Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Limbah Ternak Sapi di Desa Haurngombong Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang” menyatakan :

“Dalam Pencapaian teknologi Tepat guna, Desa Haurngombong telah mengembangkan model teknologi energi terbarukan yang bersumber dari kotoran limbah ternak sapi perah menjadi Biogas yang dapat digunakan oleh rumah tangga untuk keperluan bahan bakar dan tenaga listrik. Merupakan terobosan baru dalam membantu serta mensukseskan program pemerintah dalam hal efisiensi bahan bakar minyak dan listrik. Program pengembangan energi alternatif Biogas dari kotoran sapi perah merupakan program rintisan desa. Program desa mandiri energi mulai diterapkan di Desa Haurngombong sejak tahun 2003. Dilandasi oleh melimpahnya limbah kotoran ternak, pencemaran lingkungan, menyebarnya penyakit pada masyarakat desa yang dikhawatirkan akan berdampak pada masalah sosial, serta tingginya harga BBM menimbulkan inisiatif para kelompok peternak

di Desa Haurngombong untuk melakukan pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas”.

Pemilihan lokasi sebagai pelaksana program DME haruslah melihat dari kondisi geografis daerahnya agar tidak ada permasalahan lingkungan dan program DME bisa terealisasi secara lancar. Pemilihan lokasi difokuskan pada komunitas peternak sapi dengan populasi yang tinggi dan juga melihat geografis serta aspek lainnya.

Tabel 1 Jenis Ternak dan Peternak di Desa Mulyosari tahun 2016

| No | Jenis Ternak | Peternak | Jumlah Ternak |
|----|---------------|----------|---------------|
| 1 | Sapi | 656 | 1681 |
| 2 | Sapi perah | 1178 | 2692 |
| 3 | Kerbau | 17 | 38 |
| 4 | Kambing/Domba | 1231 | 2833 |
| 5 | Ayam kampung | 879 | 2349 |

Sumber : Kecamatan Pagerwojo dalam Angka, 2017

Berdasarkan data jumlah ternak sapi di atas, sehingga sangat cocok bila Desa Mulyosari tersebut mulai memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu kotoran sapi yang sangat melimpah sebagai bahan utama pembuatan sumber daya biogas. Model dan bahan yang digunakan sebagai pembuatan unit biogas di masyarakat sangatlah beragam dan standarisasi. Secara teknis unit biogas minimal terdiri dari masukan (*in let*), tangki pencernaan (*digester*), pengeluaran (*out let*). Tetapi fakta di lapangan berbeda karena bahan pembuat unit biogas ditentukan oleh para penentu kebijakan dan petani ternak masih belum banyak yang mengetahui tentang unit biogas. Dalam pengembangannya unit biogas banyak dijumpai permasalahan-permasalahan yang perlu di selesaikan seperti halnya minimnya sarana dan prasarana serta lemahnya kelembagaan pada

tingkat operasional. Karena belum ada koordinasi yang jelas dari semua *stakeholder* yang bersangkutan contohnya pemerintah hanya menyediakan atau membuat unit biogas tetapi masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakannya serta keterbatasan dana untuk mengelolanya. Di samping itu, penguatan manajemen dan kelembagaan baik di tingkat Pemerintahan maupun kelompok tani ternak sebagai lembaga ekonomi masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan program agar terjaminnya komunitas keberadaan unit biogas.

Program Desa Mandiri Energi pada Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.24/397/013/2013 bahwa telah ditetapkan lokasi pilot project Desa Mandiri Energi Tahun 2014 di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Penetapan lokasi program didasarkan pada a) potensi sumber bahan baku (kotoran ternak) untuk pengembangan biogas sangat tinggi, b) tersedianya lahan yang cukup untuk pembuatan instalasi biogas, c) kebutuhan masyarakat akan biogas sangat tinggi, d) 110 KK sangat miskin, 321 KK miskin, dan 153 KK hampir miskin, e) merupakan daerah terpencil dan termasuk wilayah tertinggal yang jauh dari pusat kota Tulungagung. (Diakses pada tulungagung.go.id). Tujuan dari pelaksanaan program DME di Desa Mulyosari adalah meningkatkan ketersediaan energi alternatif berbasis biogas sapi perah bagi peternak sapi perah. Desa Mulyosari sangat sesuai untuk menggunakan energi alternatif biogas karena mayoritas penduduk di Desa Mulyosari adalah peternak sapi perah.

Program Desa Mandiri Energi tersebut telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018(RPJMD). Salah satu program yang menjadi prioritas dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tulungagung adalah pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya alam desa yaitu pemanfaatan limbah/kotoran sapi perah menjadi energi alternatif terbarukan pengganti minyak tanah, gas elpiji dan listrik. Dasar dari program ini didasarkan pada analisa potensi yang meliputi: Potensi Peternakan yang cukup memadai dan merupakan mata pencaharian pokok warga desa, Limbah peternakan yang melimpah, apabila tidak dimanfaatkan akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi masyarakat, Potensi konflik sosial yang berdampak pada eksistensi usaha peternakan.

Tabel 2 Jumlah Pengguna Biogas Tahun 2014-2017

| Tahun | Jumlah Pengguna Biogas |
|--------------|-------------------------------|
| 2014 | 11 |
| 2015 | 23 |
| 2016 | 76 |
| 2017 | 102 |

Sumber: Profil Desa Mulyosari, 2017

Namun dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari masih terdapat masalah dikarenakan kurangnya pemahaman partisipasi dari masyarakat karena program ini dirasa masih baru dan belum banyak orang yang mengerti, kemudian masih lemahnya koordinasi antar instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program ini, serta dibutuhkan sumberdaya manusia yang komponen agar mampu menjalankan teknologi yang digunakan. Permasalahan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah

bagi instansi terkait untuk menemukan pemecahannya. Salah satu hal yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah dengan mengadakan sosialisasi secara mendalam kepada warga setempat sebelum pelaksanaan berlangsung, kemudian untuk memperlancar jalannya pelaksanaan dengan menguatkan koordinasi antar lini organisasi dan lembaga yang terlibat. Namun, dari semua yang telah dilakukan diatas ternyata masih belum bisa mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama kepada pihak terkait dalam penelitian ini, sehingga ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat, teknis maupun manfaat secara teoritis. Berikut kontribusi yang ingin dicapai adalah :

1. Kontribusi Akademis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam bidang studi administrasi publik mengenai konsep program, energi berkelanjutan dan analisis Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini ini dapat digunakan peneliti sebagai sarana untuk memberikan ilmu dan bahan informasi dalam bidang studi administrasi publik mengenai konsep program, energi berkelanjutan dan analisis Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga selanjutnya, penelitin lain setelah penelitian ini menjadi lebih baik.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, juga pembelajaran dan bahan perbaikan bagi pihak-pihak terkait khususnya pemerintah Kabupaten Tulungagung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, masyarakat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Energi berbasis Pemberdayaan Masyarakat tersebut agar dimasa yang akan datang menjadi lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah memahami isi proposal ini, maka akan menyajikan uraian secara singkat dari masing-masing bab I, bab II, bab III, bab IV dan bab V yang berisi tentang uraian secara umum, teori-teori, penyajian data dan pembahasan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi yang sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan penulisan ini berisi tentang Latar Belakang mengenai Implementasi program desa mandiri energi berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyosari, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi berbagai macam teori antara lain : Administrasi Publik, Konsep Pembangunan, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mandiri Energi.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam metode penelitian dilanjutkan dengan fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi dari bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan data tentang judul yang diambil, yang berisi Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi program desa mandiri energi berbasis pemberdayaan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada penyelenggara program berdasarkan hasil temuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi . Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Siagian (2001:4) mengatakan bahwa “administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan menurut Waldo (1991) administrasi merupakan rangkaian kerjasama manusia yang mempunyai derajat rasionalitas yang tinggi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Seperti yang sudah di jelaskan mengenai definisi administrasi sebagaimana disebutkan di atas, maka administrasi publik (negara) banyak juga

dikemukakan para ahli, di antaranya Waldo (1991:26) yang mengemukakan bahwa “Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan”. Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah/swasta yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan yaitu pelayanan kepada masyarakat.

B. Pembangunan

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu langkah untuk menuju pada pembangunan agar bisa memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses

perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Sedangkan menurut Siagian (1999:4) dalam buku Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya) berpendapat bahwa “Pembangunan adalah suatu hal yang sudah terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” Dari definisi diatas akan muncul tujuh ide pokok:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka waktu pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, yang dimana dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan pembangunan
5. Pembangunan mengarah modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional.
7. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga semakin kukuh fondasinya dan menjadi negara yang sejajar dengan bangsa lain. (Sondang P. Siagian, 2001)

Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan

masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak.

Teori pembangunan inilah yang bisa menjadi dasar dalam pembuatan program kerja dalam suatu kebijakan sesuai dengan tema peneliti yaitu Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Artinya, penyusunan dan penentuan program kerja bukan hanya dimaksudkan sebagai rincian rencana tetapi juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Agar pelaksanaan rencana efisien dan efektif maka semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan harus berkomitmen untuk melakukan kegiatan.

2. Pembangunan Berpusat pada Rakyat (*People Centered Develepment*)

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*People Centered Delovepment*). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan. Menurut Korten dalam bukunya Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013:51-52) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Selanjutnya Korten mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

1. Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin
3. Kebutuhan akan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Menurut Nasikun dalam bukunya Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013: 80) paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan pertama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat didalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastruktur. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan mamfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh. Aspek penting dalam suatu program pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan

ketergantungan serta berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting.

Menurut Moelyarto (1999) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat, meliputi :

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan sentralistik.
- d. Budaya kelembagaan ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
- e. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal dan sebagainya, yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya setempat.

C. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu cara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jones dalam bukunya Winarno (2002:14) istilah kebijakan (*policy*) sudah sering digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan. Namun secara umum istilah kebijakan (*policy*) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya, lembaga pemerintah, suatu kelompok atau aktor dalam bidang-bidang tertentu. Pengertian kebijakan sangat relatif luas, oleh karena itu, memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang tepat.

Menurut Dunn (2003) mengatakan “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” . Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya Winarno (2002:15) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pendapat Dye mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini di sangkutkan pada pendapat W.I Jenkins (1978) dalam bukunya Wahab (2012:14) mengatakan bahwa : “*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut).

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi.

2. Tahapan Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik yang ada juga sangat beragam, mulai dari yang sederhana, hingga yang rumit (Winarno, 2002:28) . Menurut Winarno (2002) tahapan-tahapan kebijakan dibagi menjadi lima, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

a. Tahap Penyusunan Agenda

Tahap penyusunan agenda merupakan sebuah tahap dimana pembuat kebijakan menyusun dan merancang pokok-pokok permasalahan dalam suatu kebijakan. Pada akhirnya, masalah yang telah difokuskan akan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, kemudian permasalahan yang ada akan dicari pemecahan masalah dengan berbagai alternatif yang ada dan di pilih yang paling baik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan, pada akhirnya dipilih satu alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Kemudian pada alternatif kebijakan yang sebelumnya telah dibuat nantinya akan diadopsi dengan dukungan dari pihak legislatif.

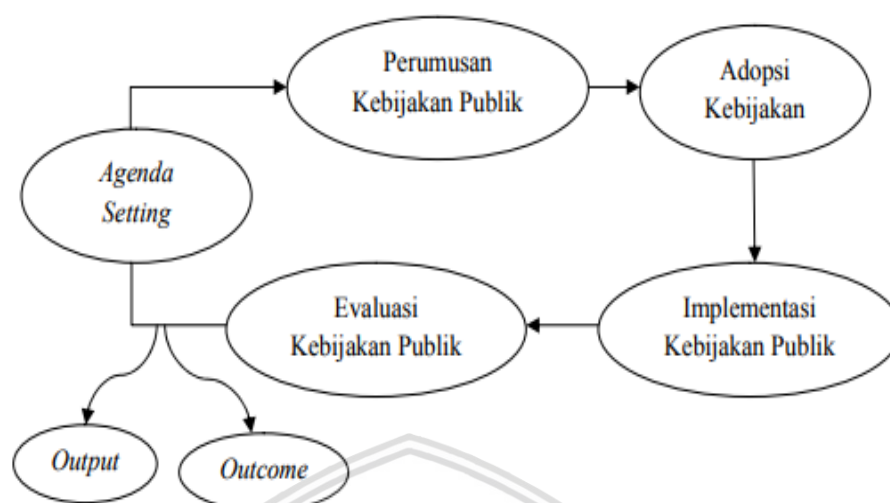
d. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahapan selanjutnya adalah implementasi kebijakan yang merupakan tahap dimana alternatif kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena keberhasilan suatu kebijakan salah satunya dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan tanpa implementasi hanyalah berupa berkas yang tidak berguna. Oleh karena itu, tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam seluruh tahapan kebijakan.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap evaluasi, kebijakan akan dilihat atau dinilai sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kemudian kebijakan tersebut akan ditinjau kembali apakah kebijakan tersebut harus dilanjutkan atau diperbaiki.

Proses kebijakan publik secara sederhana dapat dilihat pada skema di bawah ini :



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik
Sumber : Winarno (2002:29)

Penjelasan dari skema diatas adalah tahap pembuatan kebijakan publik berawal dari adanya agenda setting yang selanjutnya dirumuskan, kemudian dilakukanlah adopsi atas kebijakan tersebut yang selanjutnya kebijakan akan diimplementasikan. Pada akhirnya, kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut akan sampai pada tahap evaluasi kebijakan publik. Dari evaluasi kebijakan akan muncul dua hasil dari implementasi kebijakan tersebut, yaitu *output* (dampak yang dirasakan secara langsung) dan *outcome* (dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang). Dari hasil evaluasi tersebut, pembuat kebijakan akan dapat mengetahui apakah kebijakan yang telah dibuat dapat kembali diimplementasikan, diperbaiki atau harus dihapuskan. Seperti penjelasan di atas, tahap implementasi kebijakan merupakan tahap dimana kebijakan yang telah dibuat dapat dijalankan dan dilihat apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rumusan dan tujuan, sehingga kedepannya dapat dilakukan evaluasi kebijakan.

Implementasi merupakan tahapan yang krusial, rumit, dan kompleks dalam proses kebijakan publik. Namun, implementasi memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi saja. Pada saat implementasi, dilakukan pemantauan untuk memastikan implementasi kebijakan konsisten dengan rumusan kebijakan. Hasil implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan. Pada saat inilah diperlukan evaluasi kebijakan. Hasil evaluasi akan menentukan apakah kebijakan dilanjutkan atau membawa isu kebijakan baru, yang mengarah pada dua pilihan, revisi atau penghentian kebijakan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti tahap implementasi dalam kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan karena kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Program Desa Mandiri Energi merupakan sebuah kebijakan bidang energi alternatif yang memiliki tujuan baik bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan ketersediaan energi di desa, sehingga tahap implementasinya merupakan tahap yang paling tepat untuk diteliti serta untuk melihat apakah tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai dalam pelaksanaannya dan efektif untuk dilaksanakan.

D. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mzmanian dan Sabatier (1986) dalam Wahab (2008:184-185) menjelaskan bahwa dengan mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti kita berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dilakukan atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang terjadi secara proses pengesahan/legislasi kebijakan publik. Menurut Wahab (2008) menyatakan dalam proses implementasi atau pengadministrasian setiap program mungkin banyak aktor yang terlibat dalam penentuan pilihan-pilihan mengenai alokasi sumber-sumber publik serta banyak pihak yang mungkin berusaha keras untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan di tingkat bawah. Van Metter dan Van Horn dalam Widodo (2001) menguraikan implementasi sebagai: *“policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievements of objectives set forth in prior policy decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”* (implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang dimaksud dalam

keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini termasuk salah satu upaya waktu untuk mengubah keputusan menjadi syarat operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil diamanatkan oleh keputusan kebijakan).

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh publik pemerintah maupun dengan individu (satu kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Patton dan Sawicki mengemukakan pengertian implementasi dalam buku Harsel Nogi S. Tangkilisan yang berjudul *Kebijakan Publik Yang Membumi*:

“Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan, 2003:9).

Berdasarkan pengertian diatas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang

dapat diikuti dengan mudah bagi relaisasi program yang dilaksanakan. Mazmainan dan Sabatier dalam Widodo (2001:192) menjelaskan bahwa “memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Hal tersebut menjelaskan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri sendiri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuasaan politik, ekomoni, dan sosial yang langsung atau pada akhirnya berpengaruh dan berdampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program.

Menurut Winarno (2005) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dipahami sebagai proses keluaran (output) maupun hasil, yang melibatkan aktor organisasi, prosedur, dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan daat mencapai tujuan. Diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari

kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Mazmainan dan Sabatier dalam Widodo (2001) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan hukum pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut. Menurut Darwin dalam widodo, 2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam persiapan proses implemenatsi kebijakan yang perlu dilakukan yaitu: pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau kelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat publik.

Menurut Jones (1996) bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya menuntut adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi, batasan implementasi sebagai proses penerimaan

sumberdaya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan untuk mncapai perubahan yang kecil maupun besar yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Freedman dalam bukunya Charles O. Jones (1991: 296) yang berjudul pengantar kebijakan publik mengemukakan ada tiga pilar dalam mengimplemenatsikan program, antara lain:

- a) Organisasi : pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b) Interpretasi : menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c) Penerepan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Berdasarkan pendapat Jones tersebut, ada tiga macam aktivitas implementasi kebijakan publik yang Pertama, aktivitas organisasi merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan program yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Kedua, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dari suatu program dalam bahasa lebih operasional dan mudah dipahami sehingga substansi kebijakan dapat diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Ketiga, aktivitas aplikasi penyediaan pelayanan secara rutin , pembayaran dan lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ada. Teori Jones itulah yang dijadikan peneliti sebagai fokus penelitian dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Suatu program dianggap baik apabila program tersebut memiliki unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif untuk menemukan hal-hal yang baru dan juga gagasan-gagasan baru. Dengan demikian program tersebut memang bersifat membangun. Program-program juga dapat digunakan sebagai alat pemecah suatu masalah. Ciri-ciri program yang memiliki unsur inovatif, antara lain :

- a) Tujuan yang dirumuskan jelas
- b) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2008) menyatakan bahwa ada 3 pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu 1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, 2) terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal ataupun jamak berkesinambungan, 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan adanya program diharapkan nantinya suatu kegiatan dapat lebih mudah untuk di operasikan. Oleh karena itu, semua program diharapkan mampu membuat perubahan yang positif. Dengan melihat ciri-ciri program yang inovatif diatas maka program akan lebih

mudah dilaksanakan dengan melihat memaksimalkan keuntungan terbanyak dan meminimalisir kekurangan yang akan terjadi.

2) Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2012) dalam memahami implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, meliputi :

a) Pendekatan-pendekatan struktural (*Struktural Approaches*)

Pendekatan ini melihat bahwa proses perumusan kebijakan sangat ditentukan oleh peran dari institusi atau organisasi. Maka dari itu, dalam prosesnya perlu dibarengi dengan proses penataan institusi. Namun jika institusi atau organisasi lebih dulu tersusun, implementasi kebijakan disesuaikan dengan bidang tugas dari organisasi yang sudah ada.

b) Pendekatan-pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approach*)

Pendekatan ini memandang implementasi sebagai masalah teknik atau masalah manajerial. Setelah identifikasi dan pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitasnya memenuhi syarat, maka tahap implementasi urutan langkah-langkahnya sebagai berikut :

- (1) Merancang bangun (mendesain) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu

(2) Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat

(3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

c) Pendekatan-pendekatan Keperilakuan (*Behavioral Approaches*)

Pendekatan ini ada hubungannya dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan dan juga pendekatan dalam penyampaian serta cara mengimplementasikannya.

d) Pendekatan- pendekatan Politik (*Poliyical Approaches*)

Dalam pendekatan ini yang dimaksud politik lebih mengau pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan di dalam lingkungan organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok dominan memaksakan kehendaknya. Apabila kelompok tersebut tidak implementasi kebijakan munhkin hanya dicapai melalui proses yang panjang yang bersifat inkremental dan pengertian diantara orang-orang yang terlibat. Walaupun kebijakan telah disahkan, distribusi kekuasaan dapat menimbulkan saat implementasi kebijakan.

e) Pendekatan berbasis pada kekuatan pasar (*Market base approach*)
atau bisa dikatakan sebagai pendekatan manajemen atau manajerial

dimana dalam pengimplementasiannya lebih lentur dan juga melibatkan dari banyak *stakeholder* yang terlibat dalam implementasinya. Dimana dalam implementasinya juga harus melihat masalah teknis atau masalah manajerialnya, dengan melihat prosedur-prosedur seperti penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*control*).

3) Pendekatan *Top-Down*, *Bottom-up*, dan *Hybrid Model*

Beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik Menurut Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) mengemukakan pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga model yaitu model kebijakan Top-down, bottom-up, dan hybrid model. Pertama, Pendekatan secara top-down, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar. Pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga dapat membuat keputusan meremehkan intensif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain. Kedua, pendekatan secara bottom-up, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan bottom-up didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri

implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasikan. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuat keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat.

Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan publik memerlukan model implementasi yang berlainan, karena ada kebijakan yang perlu diimplementasikan secara top-down atau secara bottom-up. Kebijakan-kebijakan yang bersifat top-down adalah kebijakan yang bersifat secara strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan mengenai aniterorisme. Berbeda dengan kebijakan yang lebih efektif jika diimplementasikan secara bottom-up yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung berkenaan dengan *national security*, seperti kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat.

Ketiga, pendekatan secara hybrid model, dalam implementasi kebijakan, pilihan implementasi kebijakan yang paling efektif adalah jika kita membuat kombinasi kebijakan secara partisipatif, artinya bersifat top-down dan bottom-up. Model ini biasanya lebih dapat berjalan secara efektif, berkesinambungan dan murah, bahkan dapat juga dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat *national security*. Dalam penelitian ini pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan secara gabungan atau partisipatif dimana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat

direspons dengan baik oleh masyarakat. Satu hal yang paling penting adalah implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri (Nugroho. 2006) pada prinsipnya harus memenuhi “empat tepat” dalam rangka keefektifan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1) Apakah kebijakan sendiri sudah tepat

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

2) Ketepatan pelaksana

Aktor implementasi bukan hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah kerjasama dengan pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang di swastakan.

3) Ketepatan target implementasi

Ketepatan disini berdasarkan atas tiga hal yaitu pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4) Apakah lingkungan implementasi sudah tepat

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu a) lingkungan kebijakan, merupakan interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan lembaga lain yang terkait. b) lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, perspektif publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *intterpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

a. Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002). Faktor pendukung adalah hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997) yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya

- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Komunikasi. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk

pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan akan berjalan lancar bisa mempunyai faktor pendukung seperti yang sudah dijelaskan diatas. Dengan teori tersebut yang menjadi pedoman peneliti

dalam menentukan faktor pendukung seperti fakta di lapangan dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit / bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Menurut Soenarko (2003) ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan, antara lain:

- a) Teori yang menjadi dasar kebijaksanaan itu tidak tepat
- b) Sarana yang dipilih untuk melaksanakan tidak efektif
- c) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d) Isi dari kebijakan bersifat samar-samar
- e) Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor ekstern
- f) Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan permasalahan teknis
- g) Adanya kekurangan akan tersediannya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumber daya manusia)

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila

perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari kemampuan tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Sedangkan menurut Soetomo (2011:25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Dengan lebih jelasnya mengenai arti pemberdayaan masyarakat tersebut diutarakan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan

mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pendapat lain dikemukakan oleh Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) mengatakan :

“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan perilaku kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana informal untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pembangunan atau upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat yang kurang mampu agar dapat merubah kehidupannya dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang di berdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui aktivitas. Ada pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat dapat membangun atau mengubah sikap, perilaku, dan taraf hidupnya.

Menurut Soetarto dalam Abu Huraerah (2008), pemberdayaan masyarakat mempunyai 2 (dua) pengertian yang saling berkaitan satu sama yang lain, antara lain :

1. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar menjadi sumber baik untuk mendukung bentuk

usaha kesejahteraan sosial. Unsur dari masyarakat yang dapat menjadi sumber antara lain :

- a. Semua warga masyarakat yang selama ini telah aktif mengabdikan diri dibidang usaha kesejahteraan sosial, baik secara perorangan maupun dalam kelompok atau organisasi.
 - b. Semua warga masyarakat baik perorangan maupun dalam kelompok atau organisasi seperti diatas, karena alasan tertentu, tidak atau belum aktif mengabdikan diri dibidang usaha kesejahteraan sosial karena satu alasan atau lebih.
2. Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya. Peran tersebut berkaitan dengan :
- a. Pemahaman lingkungan
Setiap pemberdaya masyarakat harus memahami karakteristik pemilik sumber di lingkungan masing-masing, kondisi lingkungan sosial dan budaya di lingkungan tersebut.
 - b. Pemberi informasi
Informasi merupakan faktor paling lemah dalam usaha kesejahteraan sosial, informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara terus menerus adalah yang berkaitan dengan masalah sosial yang diperoleh masyarakat.
 - c. Pelatihan dan pengembangan

Pelatihan dan pengembangan bagi para pengabdian usaha kesejahteraan sosial sebaiknya tidak dilakukan sebelum pengabdian seperti selalu dilakukan selama ini, tetapi sudah pengabdian. Pelatihan tidak ditentukan oleh penanggungjawab usaha kesejahteraan sosial, tetapi berdasarkan jenis pelatihan, lama waktu dan tempat berdasarkan pengalaman dan kebutuhannya.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Menurut Tjokowinoto ada 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya ;

“Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan

mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Edi Suharto (2008) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan, yaitu ;

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari atau kebutuhan dirinya.

- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan sendiri maupun bersama mengenai keputusan-keputusan keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah Kelurahan
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan.

Berdasarkan indikator-indikator mengenai pemberdayaan diatas maka seseorang bisa dikatakan bisa berdaya atau ada kemandirian dalam kehidupan di masyarakat.

D. Desa Mandiri Energi

1. Pengertian Desa Mandiri Energi

Energi merupakan salah satu permasalahan nasional yang yang harus dihadapi baik dalam keperluan rumah tangga, maupun keperluan untuk industri dan transportasi. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai rencana pengurangan penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk keperluan rumah tangga

termasuk untuk keperluan industri kecil. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi di pedesaan maka perlu memanfaatkan sumber daya alternatif yang berkaitan dengan energi untuk menjadi terobosan dalam permasalahan energi nasional. Terobosan yang dimaksud adalah melaksanakan program Desa Mandiri Energi. Tujuan dari mandiri energi itu sendiri adalah dalam penyediaan energi non BBM di pedesaan secara swasembada untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

Menurut Permen ESDM No. 25 Tahun 2013, menyatakan Desa Mandiri Energi didefinisikan sebagai desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri. Atau dengan kata lain, Desa Mandiri Energi adalah desa dimana masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumberdaya setempat. Energi Terbarukan adalah energi yang pada umumnya merupakan sumberdaya non fosil yang dapat diperbaharui dan apabila dikelola dengan baik maka sumberdayanya tidak akan habis. Dari pengertiannya sudah dijelaskan bahwa semua energi terbarukan sudah pasti juga merupakan energi berkelanjutan, karena

senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya.

Program Desa Mandiri Energi (DME) atau Bio Energi Pedesaan (BEP) adalah berkembangnya swadaya masyarakat dalam penyediaan dan penggunaan bio energi (biogas, biomasa, dan biofel) bagi keperluan rumah tangga termasuk untuk kegiatan usaha industri rumah tangga khususnya di pedesaan. Adapun sasaran (*output*) dan *Outcome* dalam program DME/BEP adalah :

1. *Output*

- a. Tersosialisasinya teknologi penyediaan bio energi secara swadaya untuk keperluan rumah tangga khususnya di pedesaan
- b. Terbangunya pilot model biogas, biomasa dan biofuel di setiap provinsi

2. *Outcome*

- a. Diterapkannya teknologi penyediaan dan penggunaan bio energi untuk keperluan rumah tangga khususnya di pedesaan.
- b. Berkembangnya usaha agribisnis yang terpadu dengan penyediaan bio energi
- c. Berkembangnya usaha agroindustri masyarakat yang ditunjang oleh penyediaan dan penggunaan bio energi secara swadaya oleh masyarakat di pedesaan.

Dengan adanya *output* dan *outcome* maka diharapkan program DME/BEP akan mempunyai dampak (*impact*) positif dalam hal :

- a. Tersedianya energi untuk rumah tangga
- b. Berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap bahan energi konvensional
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. Kelestarian sumber daya dan lingkungan, karena berkurangnya penggunaan kayu bakar dari penebangan hutan serta berkurangnya emisi gas rumah kaca terutama metana dan karbon dioksida.

2. Energi Berkelanjutan

Energi merupakan kebutuhan manusia yang wajib terpenuhi, karena energi merupakan penopang kehidupan manusia dimasa mendatang. Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan energi alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Energi alam bisa terdapat dimana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Menurut Arif Alfatah & Muji Lestari (2009), energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Dalam kenyataannya setiap dilakukan usaha selalu ada perubahan. Sehingga usaha juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Energi yang berkelanjutan (*Sustainable energy*) adalah penyediaan energi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu Teknologi energi

berkelanjutan berasal dari sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, energi surya, energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi, foto sintesis buatan, dan tenaga pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi.

Energi terbarukan (*renewable energy*) yang dimanfaatkan haruslah memiliki syarat yang mencakup aspek keberlanjutan, regional development, dan ramah lingkungan. Keberlanjutan diartikan sebagai energi yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa batas waktu, sehingga tidak terbentur dengan permasalahan keterbatasan sumber daya energi. Sedangkan *regional development* merupakan pembangunan bersifat regional yang berupaya mengembangkan kemandirian berbasis kelebihan yang ada pada masing-masing daerah. Kemudian, selain itu aspek ramah lingkungan menyempurnakan konsep kemandirian energi yang berusaha untuk selaras dengan lingkungan, tidak berdampak buruk di kemudian hari, dan tidak bersifat eksploitasi.

Dengan adanya energi berkelanjutan maka akan menghemat ketersediaan sumberdaya energi saat ini, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada yang ada yang bisa dijadikan energi dalam kebutuhan manusia. Maka dari itu, perlunya perencanaan energi untuk mewujudkan energi yang berkelanjutan. Perencanaan energi yang baik harus mampu mengintegrasikan semua subsektor energi, termasuk sektor energi pedesaan dan faktor yang terkait dengan sektor energi sebagai satu kesatuan. Faktor terkait diantaranya adalah faktor teknik, faktor ekonomi, faktor sosial dan

faktor lingkungan. Langkah penting yang harus dilakukan dalam perencanaan energi adalah mengidentifikasi kelompok data yang dibutuhkan bagi analisis permintaan energi, mengkaji berbagai sumber daya energi untuk memenuhi permintaan dan mengembangkan berbagai alternatif keseimbangan permintaan – penawaran energi.

3. Biogas

Salah satu sumber daya energi terbarukan yang berasal dari sumber daya alam hayati adalah biogas dari kotoran ternak. Biogas adalah suatu gas yang dihasilkan dari proses anaerobik (fermentasi) bahan organik seperti kotoran manusia, limbah rumah tangga dan juga kotoran hewan. Bahan yang sangat dibutuhkan dalam membuat biogas yaitu metana dan karbon dioksida yang terkandung di dalam bahan organik. Biogas merupakan produk dari pendegradasian substrat organik secara anaerobik. Sedangkan menurut Indartono (2006), teknologi biogas pada dasarnya memanfaatkan proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri metanogen yang produknya berupa gas metan (CH_4) yang mencapai 60 %. Bakteri ini bekerja pada lingkungan yang tidak ada udara (anaerob), sehingga proses ini juga disebut pencernaan anaerob (anerob digestion).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biogas merupakan bahan bakar gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran manusia dan

hewan, limbah domestik (rumah tangga), atau degradasi anaerobik bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian yang melibatkan masyarakat, maka peneliti bisa memilih salah satu alternatif dari berbagai metode penelitian yang ada. Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian karena berguna untuk menentukan arah kegiatan yang dilakukan agar dapat mempermudah peneliti dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu peneliti jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut sugiyono (2015:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada generalisasi. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif itu sendiri adalah pilihan peneliti karena tujuan peneliti yaitu ingin mendapatkan data untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh berkenaan dengan Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian deskriptif sendiri lebih mengarah pada data yang berbentuk olahan kata, serta hasilnya berupa sajian atau kutipan-kutipan. Pendekatan kualitatif dapat berperan untuk

mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan atau kelemahan suatu sistem sehingga dapat ditemukan upaya untuk menyempurnakannya.

Peneliti memilih penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dapat menyajikan data secara akurat, sistematis, dan faktual mengenai fakta-fakta di lapangan yang terkait dengan bagaimana dan apa saja hambatan implementasi Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu penelitian karena digunakan untuk membatasi mencapai dan atau menjadi pusat perhatian untuk suatu permasalahan yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahan. Menurut Moleong (2009:97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian yang digunakan dalam mengimplementasikan program dengan menggunakan teori Freedman dalam bukunya Charles O.

Jones (1991:304-328). Oleh karena itu peneliti menentukan fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam melakukan penelitian adalah :

1. Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Organisasi
 - 1) Struktur organisasi
 - 2) Sumberdaya pelaksanaan program Desa Mandiri Energi
 - 3) OPD yang terkait dengan pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi
 - b. Interpretasi, kesesuaian program dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program.
 - c. Penerapan atau Aplikasi
 - 1) Persiapan,
 - 2) Pelaksanaan
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian fenomena dan peristiwa yang terjadi dari dalam objek lokaasi

tersebut. Menurut Moleong (2013:128) menjelaskan bahwa lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi tentang objek yang diteliti secara lebih akurat.

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini tepatnya berada di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasarkan dengan pertimbangan peneliti, bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tulungagung yang menerapkan Program Desa Mandiri Energi dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi dengan latar belakang sumber daya alam yang sangat melimpah, dilihat dari segi ekonomi bahwa Desa Mulyosari masyarakatnya masih banyak yang menengah kebawah dengan mata pencaharian sebagaipetani dan peternak, serta kebutuhan akan energi di Desa Mulyosari sangat tinggi oleh sebab itu pemilihan lokasi di Desa Mulyosari karena Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi untuk mengembangkan Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat sebenarnya peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti, sehingga dapat memperoleh data dan informasi yang akurat untuk menjawab permasalahan dari sesuai dengan fokus penelitian. Situs penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tulungagung. Peneliti mengambil situs penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dan Desa Mulyosari karena merupakan lembaga yang berperan aktif dalam mengimplementasikan Program Desa Mandiri Energi.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian. Sumber data merupakan hal yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan (Sarwono, 2006:123). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung atau sumber utama dari tempat penelitian terhadap objek yang diteliti. Yaitu dari informan yang berupa tindakan atau kata-kata yang diamati melalui proses wawancara. Menurut Sarwono (2006:16) data Primer diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber. Adapun narasumber yang dimaksud dalam pengumpulan data antara lain :

- a. Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari

- b. Bapak Totok Joko selaku Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- c. Bapak Edi Wahyudi selaku Staff Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

d. Ibu Inem selaku warga pengguna biogas

e. Ibu Tukin selaku warga pengguna biogas

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara tidak langsung dari tempat penelitian terhadap objek yang diteliti. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan (Sarwono, 2006:210). Data sekunder data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya antara lain;

- a. Kabupaten Tulungagung dalam Angka, 2017
- b. Kecamatan Pagerwojo dalam Angka, 2017
- c. Monografi Desa Mulyosari
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018
- e. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018

- f. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung Tahun 2016
- g. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Mulyosari Tahun 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting bagi suatu penelitian karena dengan teknik pengumpulan data peneliti akan lebih mudah untuk memperoleh data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data menjadi empat bagian yaitu observasi, interview, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, relevan, tepat dan akurat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber atau responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara terbuka dengan keterangan yang diterima melalui lisan. Teknik wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya. Dengan

adanya teknik pengumpulan data dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi di daerah tersebut.

Bentuk wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Beberapa ciri dari wawancara tidak terstruktur adalah sebagai berikut :

- a) Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan.
- b) Kecepatan wawancara sulit diprediksi.
- c) Fleksibel, tetapi tetap terkontrol.
- d) Ada pedoman wawancara yang dijadikan sebagai patokan dalam alur pembicaraan, urutan pertanyaan, dan penggunaan kata.
- e) Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena

2. Observasi

Observasi merupakan suatu langkah melaksanakan survey atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang sudah ditentukan dengan mencari objek-objek yang telah direncanakan sebelumnya kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan

fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2015:310) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dan kegiatan yang berlangsung. Dengan melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan atau apa yang ditelitinya kemudian dilakukan pencatatan atas pengamatan yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:329).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2015:222). Sedangkan menurut Arikunto (2006:136), Instrumen penelitian adalah alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih

mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara..

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara berguna untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya. Pada tabel dibawah ini merupakan pedoman wawancara yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang dimaksud seperti buku, catatan lapangan, dan alat tulis untuk menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar. Catatan yang diperoleh dilapangan digunakan untuk mencatat informasi-informasi penting yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

G. Analisis Data

Menurut Creswell (2012) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Melalui penelitian kualitatif, data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menentukan sendiri metode analisis yang sesuai dengan penelitian yang dikembangkan.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dengan mengacu pada pendapat Creswell (2010) dalam bukunya Sarwono (2013:19) terdapat beberapa langkah dalam menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengorganisasi dan menginterpretasi data untuk di analisis yang mencakup diantaranya melakukan transkripsi wawancara, menyeleksi material yang ada, melakukan pengetikan catatan lapangan, menyeleksi data, dan mengaturnya kedalam berbagai tipe, bergantung pada asal sumber informasi.
2. Baca semua data pertama kali peneliti dapat memperoleh makna umum dari informasi yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan

3. Mulai melakukan analisis detail dengan proses koding yang merupakan potongan informasi yang harus dimaknai.
4. Menggunakan proses koding untuk menghasilkan suatu deskriptif latar, seperti tempat, waktu, orang, kategori, dan tema untuk di analisis.
5. Menemukan cara deskripsi dan tema yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif.
6. Melakukan interpretasi atau memberi makna data.

Beberapa langkah analisis data diatas, yang akan diterapkan dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang dapat ditulis dalam transkrip wawancara, lalu mengkoding, dipilih tema-tema yang sesuai sebagai hasil temuan, dan selanjutnya menginterpretasikan nya.

H. Uji keabsahan hasil penelitian

Uji keabsahan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong dalam (Bungin, 2007:262) yaitu melalui teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan meliputi:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Moleong dalam (Bungin, 2007:263) mengatakan apabila peneliti lebih lama di lapangan maka akan membatasi; 1) gangguan dari dampak peneliti pada konteks; 2) kekeliruan peneliti; 3) mengompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesat. Peneliti di lapangan lebih lama berarti pula menghindari distorsi yang kemungkinan terjadi selama pengumpulan data.

2. Menemukan siklus kesamaan data

Ketika menemukan data baru maka artinya peneliti masih harus bekerja untuk menemukan data lainnya karena informasi yang diperolehnya masih banyak. Akan tetapi ketika suatu hari telah didapatkan data yang sama yang pernah didapatkan oleh informan sebelumnya, dengan informasi yang baru saja diperoleh itu maka peneliti sudah menemukan siklus kesamaan data.

3. Ketekunan pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan lapangan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka derajat keabsahan data ditingkatkan pula.

4. Triangulasi dengan sumber data

Moleong dalam (Bungin, 2007:265) triangulasi sumber data memberikan kesempatan untuk dilakukannya: 1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden; 2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data; 3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela; 4) memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data; 5) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

5. Triangulasi dengan teori

Triangulasi dengan teori dapat dilakukan dengan penjelasan banding. Yaitu dapat dilakukan dengan usaha pencarian cara lainnya untuk

mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya. Apabila peneliti gagal menemukan informasi yang cukup kuat untuk menjelaskan kembali informasi yang telah diperoleh, justru peneliti telah mendapat bukti bahwa derajat kepercayaan hasil penelitian peneliti sudah tinggi.

6. Pengecekan melalui diskusi

Meoleog dalam (Bungin,2007:266) mengatakan bahwa diskusi di kalangan sejawat akan menghasilkan; 1) pandangan kritis terhadap hasil penelitian; 2) temuan teori substantive; 3) membantu mengembangkan langkah berikutnya; 4) pandangan lain sebagai pembanding.

7. Kajian kasus negatif

Kajian kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh kasus yang tidak sesuai dengan dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Kasus-kasus negatif semacam ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hal yang sama pada penelitian yang akan dan sedang dilakukan saat ini dalam rangka meningkatkan kualitas keabsahan data (Bungin,2007:267)

8. Kecukupan referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian, misalnya

gambar video lapangan, rekaman wawancara maupun catatan harian di lapangan.

9. Uraian rinci

Teknik ini dimaksud adalah suatu upaya untuk memberi penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan yang serinci-rincinya. Suatu temuan yang terperinci dan gamblang, logis dan rasional (Bungin,2007:267)



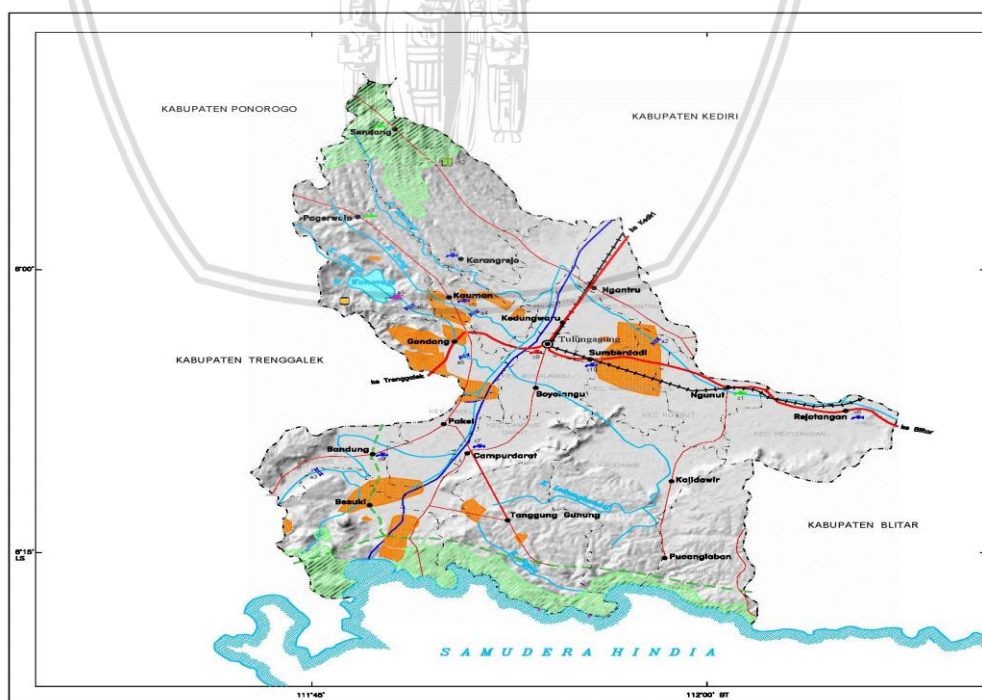
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi $111^{\circ} 43' - 112^{\circ} 07'$ bujur timur dan $7^{\circ} 51' - 8^{\circ} 18'$ lintang selatan. Secara administratif, Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Tulungagung memiliki luas yang mencapai 1.055,65 Km². Berikut peta Kabupaten Tulungagung :

Peta Kabupaten Tulungagung



Gambar 2. Peta Kabupaten Tulungagung
Sumber : Kabupaten Tulungagung dalam Angka, 2017

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah, yaitu :

1. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah atau <500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa.
2. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa.
3. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa.

Berdasarkan ketinggian tempat dari atas permukaan laut (dpl), wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Wilayah dengan ketinggian 0-100 m dpl, meliputi wilayah seluas 38.527,23 Ha atau mencakup 36,76% dari keseluruhan luas.
2. Wilayah dengan ketinggian 100-500 m dpl, meliputi wilayah seluas 64.215,89 Ha atau mencakup 55,82% dari keseluruhan luas. –
3. Wilayah dengan ketinggian 500-1.000 m dpl, meliputi wilayah seluas 9.479,38 Ha atau mencakup 7,67% dari keseluruhan luas.
4. Wilayah dengan ketinggian 1.000 m dpl, meliputi wilayah seluas 3.474,24 Ha atau mencakup 3,02% dari keseluruhan luas.

Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.856 Rukun Warga (RW) dan 6.409 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.

Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu :

- a. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis, mencakup areal seluas $\pm 25\%$;
- b. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur, mencakup areal seluas $\pm 40\%$,
- c. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya, meliputi areal seluas $\pm 35\%$.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Visi

“Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung melalui Penguatan Lembaga Perekonomian Desa dan Partisipasi Masyarakat”

b. Misi

- 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui optimalisasi lembaga perekonomian yang di dukung dengan sarana prasarana;
- 2) Meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintah desa guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

c. Tujuan

Bersadarkan Visi dan Misi diatas, maka agar terlaksananya Visi dan tercapainya Misi tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018 menetapkan tujuan yaitu “Peningkatan Desa Cerdas menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera”

d. Sasaran

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan desa diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi atau indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2014-2018 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peran lembaga perekonomian dan kemasyarakatan menuju masyarakat mandiri dan sejahtera;
- 2) Meningkatkan manajemen dan kapasitas pemerintah desa.

e. Strategi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2014-2018 dirumuskan berdasarkan visi dan misi, tujuan serta mengacu pada RPJMD tahun 2014-2019 dan evaluasi capaian kinerja pembangunan akhir tahun 2013. Strategi merupakan upaya sistematis, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui capaian sasaran dan tujuan yang ada. Adapun strategi yang telah dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan partisipatif sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- 2) Memperkuat perekonomian desa berbasis produk unggulan desa.
- 3) Penguatan koordinasi dan keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam rangka mendukung dan mengorganisir program dan kegiatan.
- 4) Mempercepat penyaluran dan penggunaan Dana Desa dalam menggerakkan sektor riil ekonomi desa.

f. Kebijakan

- 1) Mendasarkan Pembangunan Desa pada aspek Partisipatif;
- 2) Pembangun Ekonomi Lokal Mandiri Berbasis Produksi;
- 3) Sinergitas antar pelaku pembangunan sebagai kunci pelaksanaan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 4) Optimalisasi penggunaan Dana Desa.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung berbunyi sebagai berikut :

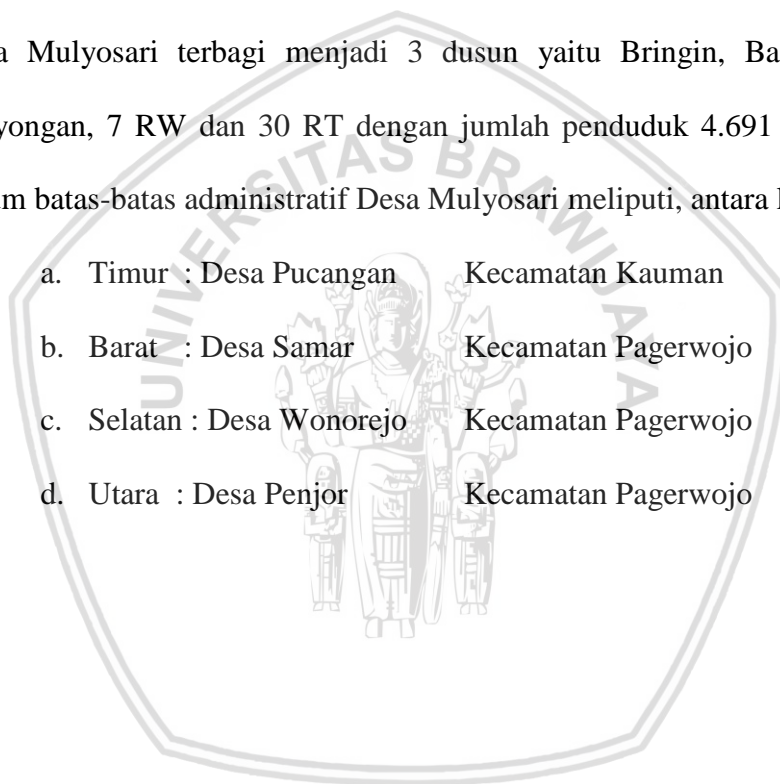
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten .
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan struktur organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung:

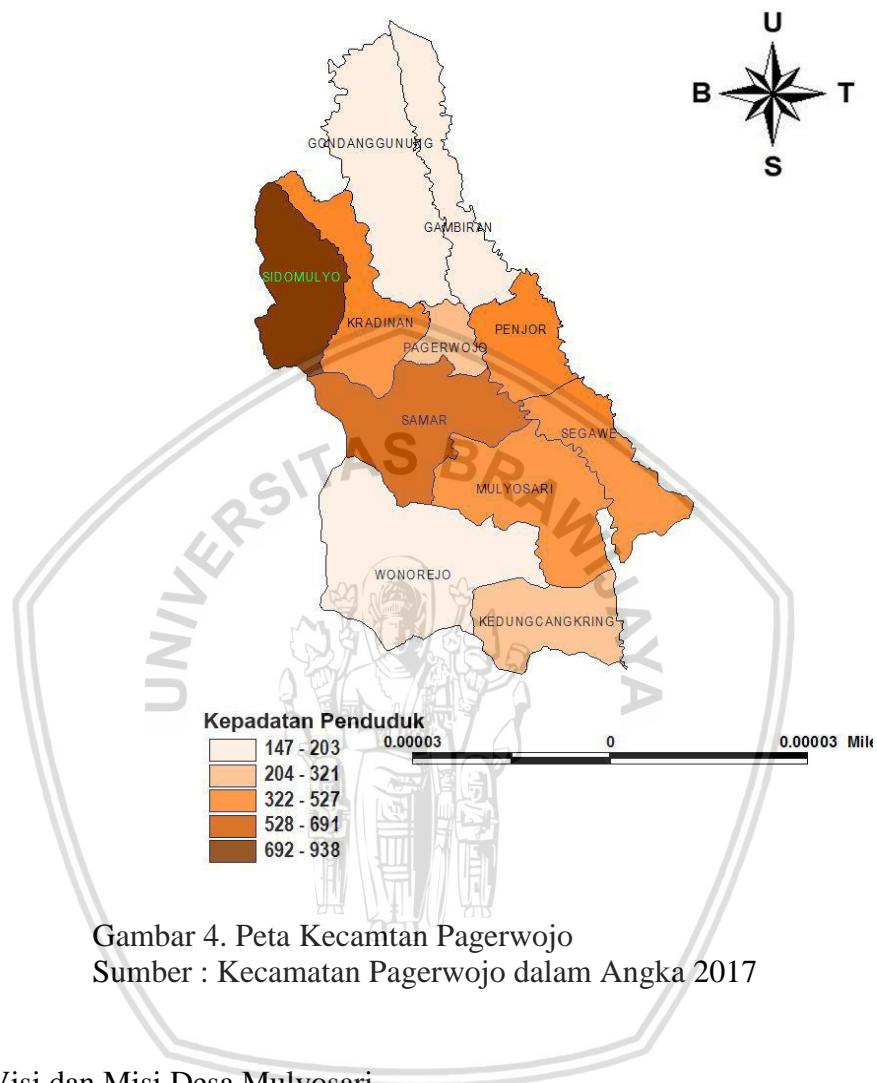


Desa Mulyosari terletak di sebelah barat Kabupaten Tulungagung yang berjarak sekitar 22 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Desa Mulyosari merupakan tempat dari pusat pemerintahan Kecamatan Pagerwojo dan merupakan ibukota kecamatan dari kecamatan Pagerwojo. Desa Mulyosari memiliki luas wilayah 9,29 Km² atau 10,53% dari luas wilayah kecamatan Pagerwojo yaitu 88,22 Km². Dari luas wilayah Desa Mulyosari terbagi menjadi 3 dusun yaitu Bringin, Bantengan dan Pabyongan, 7 RW dan 30 RT dengan jumlah penduduk 4.691 jiwa. Secara umum batas-batas administratif Desa Mulyosari meliputi, antara lain :

- a. Timur : Desa Pucangan Kecamatan Kauman
- b. Barat : Desa Samar Kecamatan Pagerwojo
- c. Selatan : Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo
- d. Utara : Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo



PETA KECAMATAN PAGERWOJO



Gambar 4. Peta Kecamatan Pagerwojo
Sumber : Kecamatan Pagerwojo dalam Angka 2017

2. Visi dan Misi Desa Mulyosari

a) Visi

“Membangun Desa Mulyosari yang makmur, aman, nyaman dan guyub rukun”.

b) Misi

- Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan bantuan modal.
- Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis.
- Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri melalui pelatihan-pelatihan.
- Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertakwa sebagai modal pembangunan manusia yang berkualitas dengan cara pembinaan mental dan rohani.

D. Penyajian Data

1. Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Implementasi Program Desa Mandiri Energi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam hal kebutuhan energi rumah tangga dan juga meningkatkan ekonomi lokal, terlebih dahulu untuk mengetahui proses implementasi tujuan dan manfaat dari implementasi program yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah kabupaten itu sendiri. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 Kabupaten Tulungagung bahwa Program Desa Mandiri Energi ada karena merupakan program turunan dari bab VIII nomor 21 tentang Program prioritas dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa poin (1) yaitu Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan. Kemudian Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018 yaitu melaksanakan program prioritas dalam rangka Peningkatan Desa Cerdas menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera.

Pengembangan Program Desa Mandiri di Desa Mulyosari karena melihat mayoritas penduduk desa tergolong bertaraf ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar mata pencahariaan warga terletak pada bidang peternakan dan pertanian. Masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara Peternakan yang paling banyak dimiliki warga adalah peternakan sapi. Dari data yang telah kami miliki terdapat 2.323 ekor sapi di Desa Mulyosari, dimana minimal terdapat dua ekor sapi di setiap rumah warga. Hal ini wajar dijumpai di daerah ini mengingat Desa Mulyosari terletak di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung yang sudah dikenal sebagai daerah pengembang peternakan sapi khususnya pada sapi perah. Dalam Pencapaian teknologi Tepat guna, Desa Mulyosari telah mengembangkan model teknologi energi terbarukan yang bersumber dari kotoran limbah ternak sapi perah menjadi Biogas yang dapat digunakan oleh rumah tangga untuk keperluan bahan bakar dan tenaga listrik. Merupakan terobosan baru dalam membantu serta mensukseskan program pemerintah dalam hal efisiensi bahan bakar minyak dan listrik.

Program yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Pemerintah Desa Mulyosari, maka perlu dilihat bentuk implementasi program tersebut

dengan melakukan penelitian lapangan. Menurut Program Desa Mandiri Energi di Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa Mulyosari yaitu dengan menggunakan biogas atau limbah kotoran sapi yang diolah menjadi biogas.

Setelah mengetahui bagaimana bentuk Program Desa Mandiri Energi yang sedang dijalankan, maka akan mempermudah untuk menganalisis mengenai manfaat biogas bagi masyarakat Desa Mulyosari. Sebelum menganalisis mengenai implementasi Program Desa Mandiri Energi terlebih dahulu mengetahui target group dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat. Target group dari implementasi Program Desa Mandiri Energi ini adalah seluruh masyarakat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“Target group dari implementasi program DME ini adalah seluruh masyarakat Desa Mulyosari mbak baik yang punya sapi perah atau pun yang tidak punya sapi. Karena beberapa dari mereka sudah tau manfaat dari pembuatan biogas. Jadi dengan adanya program ini diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi dalam pelaksanaannya”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat sudah mengikutsertakan 102 KK masyarakat Desa Mulyosari. Selanjutnya hasil

penelitian yang dirinci sesuai dengan fokus penelitian, adalah sebagai berikut :

a. Organisasi

Organisasi merupakan struktur organisasi yang sangat diperlukan dalam implementasi program. Suatu kinerja organisasi ini sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Organisasi dalam suatu implementasi program memiliki berbagai macam peranann antara lain membentuk struktur organisasi, membentuk sumberdaya yang berkualitas, dan OPD terkait. Organisasi dalam pelaksanaan program diperlukan dalam angka mempermudah jangkauan kerja dan menetapkan tujuan dari masing-masing pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu program. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk struktur organisasi yang masing-masing memiliki Tujuan Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Hal itu disampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“Jadi gini mbak, mengenai struktur organisasi dari program DME itu sendiri menggunakan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Struktur organisasi kan dikeluarkan melalui Perbub Nomor 61 Tahun 2016 yang kemudian kita laksanakan sesuai dengan TUPOKSI dari masing-masing bidang. Kebetulan program yang sedang mbak teliti mengenai program DME itu masuk di bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Totok, telah sesuai dengan Perbub Kabupaten Tulungagung Nomor 61 Tahun

2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Pembentukan struktur organisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu bentuk pelaksanaan organisasi. Semua struktur organisasi diharapkan sudah menjalankan program sesuai dengan Tupoksi dari masing-masing bidang. Tupoksi tersebut juga berguna untuk memudahkan pelaksanaan dalam implementasi program DME.

Selain pembentukan struktur organisasi, organisasi yang dibentuk dalam implelementasi program DME ini juga ada sumberdaya manusia yang berkualitas. Fungsi adanya SDM yang berkualitas diharapkan menjadi contoh dalam pelaksanaan implementasi program DME di berbagai daerah lainnya. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan program DME ini para pelaksana bisa dikatakan sudah memiliki SDM yang berkualitas dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan individu. Karena dengan SDM yang berkualitas otomatis program akan berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dipilih karena mempunyai sumberdaya manusia yang cukup berkualitas. Sumberdaya manusia yang sudah dipilih saat ini dapat memberikan contoh positif dalam pelaksanaan program

DME di daerah lain, karena dengan sumberdaya yang berkualitas bisa digunakan sebagai pedoman bagi daerah yang sedang mengembangkan Program Desa Mandiri Energi.

Selain sumberdaya manusia yang terlibat di Program Desa Mandiri Energi, pastinya juga ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam program DME, karena dalam suatu organisasi dalam implementasi program tidak terlepas dari keterlibatan OPD yang lain. Dalam implementasi program DME ini yang terlibat antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa Mulyosari dan juga bawahannya. Hal itu disampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“ jadi gini mbak, kalau OPD yang terlibat dalam implementasi program ini hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Desa Mulyosari baik itu Kepala Desa serta perangkat desa lainnya. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai peran sebagai memberdayakan masyarakat di kawasan pedesaan dengan membuat trobosan program DME itu sendiri yang bertujuan agar masyarakat bisa mandiri dalam hal kebutuhan energi rumah tangga. Kalau Perangkat Desa Mulyosari itu sendiri berperan sebagai koordinator program serta memantau langsung perkembangan dari program DME dan bila ada bantuan biogas berperan untuk memilih masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.” (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa suatu organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang melaksanakan program DME di Desa Mulyosari yang melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan

pengorganisasian mulai dari menyusun struktur organisasi, menentukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan keterlibatan antara OPD, semua sudah dilakukan untuk terlaksananya implementasi Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan terealisasi dengan baik dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya dalam tahap implementasi program adalah interpretasi, berikut adalah tahap interpretasi dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu tahapan pengenalan terhadap pelaksanaan suatu implementasi. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Interpretasi di jalankan melalui beberapa bagian, antara lain 1) konsep awal program, 2) bentuk program, 3) tujuan, program, dan 4) petunjuk teknis program. Keempat cara tersebut merupakan empat proses interpretasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi.

Interpretasi merupakan tahap awal dalam implementasi program, oleh karena itu harus mengetahui apa konsep awal dari Program Desa Mandiri Energi terlebih dahulu. Program Desa Mandiri Energi bersumber

dari Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang ditulis pada poin 4 tentang pengelolaan Desa Mandiri Energi. Program Desa Mandiri Energi diharapkan mampu memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri dalam hal kebutuhan energi rumah tangga. Program DME merupakan suatu terobosan pembangunan jangka panjang desa dimana bukan hanya pemabangunan fisik saja yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat desa tetapi juga harus ada pembangunan jangka panjang dalam mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu pemerintah Tulungagung dalam hal ini yang menanungi adalah Dinas Pemberdayaan Mayrakat dan Desa. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“gini mbak, konsep awal munculnya program DME itu merujuk dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 Ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.”, nah dari UU tersebut di lanjutkan oleh Permen PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa”, dari situlah ide awal itu muncul karena dengan melihat potensi yang ada di Desa Mulyosari dimana desa tersebut sebagian besar warganya peternak sapi oleh karena itu kan otomatis kotoran sapi yang ada banyak, oleh karena itu kita selaku aktor di bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membuat inovasi yaitu desa mandiri energi dengan berbasis biogas”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat di Desa Mulyosari mata pencaharian sebagaai peternak

sapi dengan populasi sapi yang sangat banyak. Berikut data jumlah peternak sapi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung.

Tabel 3. Data Jumlah Peternak di Desa Mulyosari

| No | Jenis Hewan | Peternak | Ternak |
|----|---------------|----------|--------|
| 1 | Sapi Perah | 467 | 1.566 |
| 2 | Sapi Potong | 413 | 757 |
| 3 | Kerbau | 10 | 42 |
| 4 | Kambing/Domba | 195 | 1.125 |
| 5 | Kelinci | 15 | 65 |
| 6 | Babi | 5 | 152 |
| 7 | Ayam Kampung | 1.642 | 11.561 |
| | Jumlah | 2747 | 15.268 |

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Desa Mandiri Energi merupakan suatu trobosan pembangunan jangka panjang dalam hal pemberdayaan masyarakat serta melihat sumber daya alam yang dimiliki Desa Mulyosari untuk pembuatan biogas sangat melimpah sehingga program DME bisa terlaksana. Agar terlaksananya Program Desa Mandiri Energi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi. Seperti Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang ada pada poin 1 dan 2 yaitu Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui optimalisasi lembaga perekonomian yang didukung dengan sarana prasarana; dan Meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat

Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“jadi tujuan utama dari Program Desa Mandiri Energi adalah agar masyarakat bisa lebih berdaya untuk kehidupan mereka baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, bisa menggali potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan agar bisa mengentaskan kemiskinan. Karena dari program ini bisa membuka lapangan pekerjaan mbak”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Menurut wawancara diatas, dengan adanya Program DME bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan untuk memandirikan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Agil Wuisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“....dengan adanya program DME ini mbak, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal energi rumah tangga, seperti dapat mengurangi pemakaian gas elpiji, mengurangi pemakaian kayu bakar, dengan pembuatan biogas maka limbahnya bisa digunakan sebagai pupuk bagi masyarakat, tidak mencemari air bersih, dan dapat membuka lapangan pekerjaan”. (Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018. Pemerintah Kabupaten Tulungagung tentunya mempunyai alasan dari implementasi program desa mandiri di Desa Mulyosari ini, yang salah satu tujuannya yaitu agar dapat memberdayakan masyarakat. Setelah mengetahui tahapan interpretasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya

adalah tahapan tujuan yang sudah direncanakan dapat di capai dengan sesuai apa yang diharapkan. seperti yang telah disampaikan pada Visi dan Misi Dinas Pemberdaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Bapak Edi Wahyudi selaku Staff di Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“sejauh Program Desa Mandiri Energi berjalan sudah bisa dikatakan sesuai dengan apa yang diharapkan mbak, dimana sebelum kita melaksanakan tujuan itu pasti ada standart Operasionalnya, dan kita menyesuaikan dengan SOP yang ada itu mbak. Kan kita juga tinggal menajalankan perintah dari pemerintah Kabupaten atau pemerintah pusat khususnya dari kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”. (Wawancara pada tanggal 6 Febuari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Implementasi program Desa Mandiri Energi sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Agil Wauisan selaku kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“...iya sesuai seperti yang dikatakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mbak, jadi gini mbak gambarannya kita sebagai pelaksana program harus melaksanakan apa yang sudah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu perintahkan sesuai dengan SOP yang ada, jadi tinggal melaksanakannya saja, dan tentu Dinas melaksanakan program tersebut pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Seperti salah satu tujuannya diaspek ekonomi contohnya dengan adanya program tersebut muncul usaha rumahan yaitu produk kripik yang penggorengannya memanfaatkan kotoran sapi atau biogas, jadi bisa menambah lapangan pekerjaan warga”. (Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Edi dan Bapak Agil dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program desa mandiri ini sudah terlaksana

sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah atau pun masyarakat. Para pelaksana diharapkan mampu melaksanakan sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan terlaksananya implelementasi Program Desa Mandiri Energi, adapun capaian yang sudah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“iya tercapainya mbak, masyarakat sudah tidak lagi membeli gas elpiji jadi bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga, dari biogas juga bisa jadi lampu bagi rumah warga, dan juga dari limbah biogas nanti bisa dijadikan pupuk oleh warga jadi tidak lagi membeli pupuk bagi tanaman. Jadi capaian dari program ini bisa mengurangi kemiskinan dan bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan masih banyak manfaatnya mbak”. (Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua tujuan yang sudah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang sudah diinginkan. Program Desa Mandiri Energi ini masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya yang ada yang digunakan sebagai memasak dan juga bisa sebagai lampu penerangan. Dari hasil capaian program ini sudah sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

Setelah tahapan implementasi program, konsep awal program, tujuan, sasaran, dan capaian program, dan selanjutnya para pelaksana diharapkan mampu melaksanakan program sesuai dengan petunjuk teknis. Petunjuk teknis. Adanya petunjuk teknis tentu para pelaksana kegiatan mampu melaksanakan program dengan mudah, karena petunjuk teknis merupakan salah satu tahapan dalam interpretasi suatu implementasi

program. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“jadi gini mbak, sejauh program ini berjalan kita dan semua para pelaksana sudah menjalankan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, karena kita melaksanakan program tersebut sudah ada petunjuk teknisnya dari pemerintah pusat atau daerah mbak. Jadi kita sebagai pelaksana tinggal melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa implementasi program itu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis, agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Petunjuk teknis dari program tersebut antara lain :

- 1) Sosialisasi
- 2) Aplikasi
- 3) Monitoring
- 4) Evaluasi
- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas melaksanakan tugas

Tahap-tahap interpretasi tersebut sudah dilakukan pada implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Interpretasi tersebut sudah sesuai dengan teori Charles O.

Jones. Setelah tahap organisasi dan interpretasi tahapan selanjutnya adalah aplikasi dari Program Desa Mandiri Energi.

c. Aplikasi

Aplikasi atau penerapan ini merupakan tahapan-tahapan kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan target jadwal kegiatan. Tahapan-tahapan ini berisi tentang persiapan atau perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Implementasi Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari dilaksanakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, serta bisa mengentaskan kemiskinan. Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari dengan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Pengembangan program desa mandiri di Desa Mulyosari dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“persiapan awal program ini kita memilih lokasi yang akan melaksanakan program dan setelah itu kita adakan sosialisasi terlebih dahulu ke Desa mbak, selanjutnya Desa mensosialisasikan kepada masyarakat kalau ada Program Desa Mandiri Energi dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi atau biogas jadi ada kerjasama antara Desa dan juga Dinas”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Pemilihan lokasi merupakan persiapan awal pada implementasi Program Desa Mandiri Energi dan selanjutnya di sosialisasikan kepada masyarakat. Hal senada juga di katakan oleh Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“iya bener mbak, pemilihan Desa Mulyosari itu ditunjuk oleh Dinas untuk melaksanakan dengan pertimbangan bahwa Desa Mulyosari sangat berpotensi dalam pengembangan program ini mbak”. (Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa persiapan awal dari pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari sudah cukup matang. Mulai dari pemilihan lokasi, sosialisasi sampai dari pelaksanaan program. Hingga saat ini peternak sapi di Desa Mulyosari berjumlah 880 peternak dengan populasi sapi berjumlah 2.323 ekor sapi. Program Desa Mandiri Energi sudah berhasil mengajak 89 KK sebagai peternak dan 13KK sebagai non peternak. Rata-rata setiap KK memanfaatkan minimal 3 sapi untuk digunakan sebagai biogas dan yang non peternak yang ikut memanfaatkan biogas dengan cara menyalurkan dari tetangga rumah terdekat.

Tabel 4. Data Jumlah Peternak dan Ternak Sapi Di Desa Mulyosari Tahun 2017

| Kelompok Tani Ternak | Jumlah Peternak (Orang) | Jumlah Ternak (Ekor) |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Pabyongan | 288 | 856 |
| 2. Bantengan | 427 | 1042 |
| 3. Bringin | 165 | 425 |
| Jumlah | 880 | 2323 |

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap peternak minimal memelihara 2 ekor sapi baik itu sapi potong ataupun sapi perah disetiap rumahnya. Selanjutnya dari 880 peternak sapi saat ini masih 89 peternak yang memanfaatkan biogas.

Tabel 5. Data Jumlah Pengguna Biogas di Desa Mulyosari Tahun 2017

| Pengguna Biogas | Kelompok Peternak | | | Jumlah |
|------------------------|-------------------|-----------|---------|--------|
| | Bantengan | Pabyongan | Bringin | |
| 1. Peternak | 23 | 36 | 30 | 89 |
| 2. Non Peternak | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Jumlah Pengguna Biogas | 25 | 43 | 34 | 102 |

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih 89 peternak sapi yang memanfaatkan biogas dan 13 non peternak dengan cara menyalurkan biogas dari tetangga atau saudara rumah yang berdekatan. Berikut adalah jumlah sapi yang limbah kotorannya dimanfaatkan sebagai biogas.

Tabel 6. Data Populasi Sapi dan Instalasi Biogas di Desa

| Keterangan | Nama Kelompok | | | Jumlah |
|-------------------------------|---------------|-----------|---------|--------|
| | Pabyongan | Bantengan | Bringin | |
| Instalasi | | | | |
| 1. Fiber | 11 | 9 | 7 | 27 |
| 2. Beton | 29 | 11 | 22 | 62 |
| Pemanfaat | | | | |
| 1. Peternak | 36 | 23 | 30 | 89 |
| 2. Non Peternak | 7 | 2 | 4 | 13 |
| Jumlah | 43 | 25 | 24 | 102 |
| Jumlah Sapi | 120 | 97 | 109 | 326 |
| Jumlah Sapi yang dimanfaatkan | 120 | 97 | 109 | 326 |

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Program Desa Mandiri Energi mulai diterapkan di Desa Mulyosari sejak tahun 2014. Dilandasi oleh melimpahnya limbah kotoran ternak, pencemaran lingkungan, menyebarnya penyakit pada masyarakat desa yang dikhawatirkan akan berdampak pada masalah sosial, serta tingginya pemenuhan energi di Desa Mulyosari untuk melakukan pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas. Pengembangan Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari dimana Pemerintah Desa mempunyai peran utama dalam memberikan motivasi (Semangat), Pembinaan, Mediasi kepada warganya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“kalau program nya sendiri sudah lama mbak, dari tahun 2013, 2014 awal sudah berjalan program itu. Tetapi kebetulan pada tahun 2016 Desa Mulyosari berkesempatan mendapatkan bantuan dari Kementrian Desa untuk mengembangkan program DME ini. Pendapatan bantuan itu banyak mbak proses pembuatan proposal hingga akhirnya di survey dan layak untuk mendapatkan bantuan biogas, terlebih lagi dengan adanya program ini masyarakat sangat berpartisipasi”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Menurut wawancara diatas, Program DME sudah berjalan 5 tahun dan pada tahun 2016 berkesempatan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat khususnya dari Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal senada juga di katakan oleh Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“nggih bener mbak, Desa Mulyosari mendapatkan bantuan 10 unit digester biogas dari Kementrian Desa yang disalurkan melalui

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Masyarakat yang menerima bantuan tidak semua warga bisa mbak, ada kriterianya seperti minimal mempunyai 3 sapi dan lahannya harus luas. ”. (Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari program itu diluncurkan tahun 2014 sampai sekarang, pelaksanaan program sudah cukup baik dengan adanya kerjasama dari semua *stakeholder* yang terlibat di dalam implementasi program ini. Salah satu penerima bantuan yaitu Ibu Tukin warga Desa Mulyosari, mengatakan bahwa :

“iya nduk, biyen tahun 2016 enek bantuan tekan pemerintah, terus sedurungu bantuan kui di kekne enek survey neng gon omah-omah sing arep dikeki bantuan koyo deloki sapine kabeh piro, lahan kandang cukup opo ora digawe nampung biogas terus wargane ditawani sanggup opo ora manfaatne bantuan. Nah kebetulan aku duwe sapi 8 dadine tak sanggupi (iya mbak, dulu tahun 2016 ada bantuan dari pemerintah, sebelum bantuan itu dikasihkan kepada warga terlebih dahulu ada survey yang di lakukan oleh pemerintah Desa di rumah-rumah yang akan dikasih bantuan biogas seperti melihat jumlah sapi yang diperlihara, luas lahan yang akan di gunakan, menegoisasi kepada warga apakah siap memanfaatkan biogas atau tidak. Saya kan pula 8 sapi jadi saya sanggup mbak)”. (Wawancara 20 febuari 2018 dirumah ibu Tukin)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penrima bantuan sudah memenuhi syarat atau SOP yang sudah ada, mulai dari survey langsung dari rumah ke rumah dengan melihat potensi yang dimilkinya.

Adapun persyaratan bagi penerima bantuan biogas antara lain :

- 1) Bantuan diberikan kepada kelompok peternak, yang penempatan melihat struktur lahan yang akan digunakan.

- 2) Untuk unit pengelolaan biogas skala kecil, kelompok ternak yang bersangkutan harus memiliki minimal 3 ekor sapi secara tetap sepanjang tahun pemeliharaan.
- 3) Untuk biogas dalam skala sedang, kelompok tani ternak harus memiliki minimal 15 ekor sapi sepanjang tahun pemeliharaan.
- 4) Diutamakan kelompok peternak yang sudah mempunyai atau sedang akan mengembangkan usaha atau bagi masyarakat yang sedang membutuhkan.

Dari persyaratan itu lah bantuan biogas di berikan kepada 10 warga yang berkopenten mendapatkan bantuan tersebut, yaitu :

Tabel 8. Data Penerima Bantuan Biogas di Desa Mulyosari Tahun 2016

| No | Nama | Dusun | RT/RW | Keterangan |
|----|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 | Yakim | Pabyongan | 003/001 | Industri Kripik |
| 2 | Sakur | Pabyongan | 001/002 | 7 Ekor Sapi |
| 3 | Miswanto | Pabyongan | 003/003 | 7 Ekor Sapi |
| 4 | Suyoto | Pabyongan | 003/005B | 6 Ekor Sapi |
| 5 | Tukin | Bantengan | 002/004A | 8 Ekor Sapi |
| 6 | Yasir | Bantengan | 002/005A | 4 Ekor Sapi |
| 7 | Kabul | Bantengan | 001/004C | 4 Ekor Sapi |
| 8 | Supani | Bantengan | 001/005B | 5 Ekor Sapi |
| 9 | Sampun Wiyono | Bringin | 002/007 | Industri Kripik |
| 10 | Mu'ani | Bringin | 003/006 | 6 Ekor Sapi |

Sumber : Data Penerima Bantuan Biogas di Desa Mulyosari Tahun 2016

Berdasarkan hasil tabel diatas disimpulkan bahwa dalam mengaplikasikan program dan bantuan biogas sudah sesuai dengan SOP yang ada. Bantuan di berikan agar masyarakat lebih berdaya lagi dalam kebutuhan energi baik digunakan untuk memasak atau untuk listrik.



Gambar 5. Serah Terima Biogas Bagi Masyarakat Desa Mulyosari
Sumber : Dokumentasi Serah Terima Biogas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2016

Selain mendapat bantuan dari pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar 10 unit instalasi biogas, pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi juga didukung melalui dana desa. Dukungan yang diberikan melalui dana desa diwujudkan dalam bentuk alat dan bahan yang kemudian di serahkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“untuk masalah pendanaan program ini melalui dana desa mbak, setiap tahun desa harus menyusun anggaran untuk pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi ini. Selain itu kita membantu mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten ataupun dari pusat” ((Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Menurut hasil wawancara diatas, bahwa dalam implementasi Pogram Desa Mandiri Energi juga di dukung dengan dana desa dengan mengacu pada Perda Kabupaten Tulunggaung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa. Hal senada juga di katakan oleh Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“bener mbak, kita selalu membuat anggaran setiap tahunnya untuk pembuatan instalasi biogas yang di berikan kepada masyarakat yang sesuai dengan SOP” ((Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Tabel 8. Alokasi Biaya Penggandaan 1 Unit digester Biogas

1. Material

| No | Nama Material | Jumlah | Satuan | Harga/sat | Harga Total |
|--------|-----------------|--------|----------|------------|--------------|
| 1 | Batu kali | 6 | m3 | 135.000,00 | 810.000,00 |
| 2 | Batu split 2x3 | 3 | m3 | 215.000,00 | 645.000,00 |
| 3 | Batu merah | 3500 | Bb | 600,00 | 2.100.000,00 |
| 4 | Pasir | 8 | m3 | 90.000,00 | 720.000,00 |
| 5 | Pasir uruk | 7 | m3 | 90.000,00 | 630.000,00 |
| 6 | Semen | 50 | Sak/40kg | 50.000,00 | 2.500.000,00 |
| 7 | Trikosal | 5 | Kg | 7.500,00 | 37.500,00 |
| 8 | Besi beton | 3 | Bt | 36.000,00 | 108.000,00 |
| 9 | Besi beton 14mm | 3 | Bt | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 9 | Besi beton 14mm | 3 | Bt | 36.000,00 | 108.000,00 |
| 10 | Pipa air | 1 | Unit | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 11 | Bendrat | 4 | Kg | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | Pipa PVC | 3 | M | 35.000,00 | 95.000,00 |
| Jumlah | | | | | 8.043.500,00 |

Sumber : Laporan Anggaran Program Desa Mandiri Energi Desa Mulyosari tahun 2016

2. Alat Pembantu

| No | Nama Material | Jumlah | Satuan | Harga/sat | Harga Total |
|--------|---------------|--------|--------|------------|-------------|
| 1 | Ember | 6 | Bj | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | Kompor | 1 | Unit | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | Sekop/cangkul | 2 | Unit | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 4 | Palu | 1 | Bb | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5 | Bambu | 15 | m3 | 8.000,00 | 120.000,00 |
| 6 | Paku | 1 | Kg | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Jumlah | | | | | 715.000,00 |

Sumber : Laporan Anggaran Program Desa Mandiri Energi Desa Mulyosari tahun 2016

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Desa Mandiri Energi dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya RKP Desa Mulyosari dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan menggunakan dana desa yang kemudian diberikan kepada masyarakat dengan bentuk alat atau bahan-bahan untuk pembuat instalasi biogas. Dari tahap aplikasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari sudah bisa dikatakan berhasil dalam pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat dalam hal ini sudah berdaya dari kebutuhan energi rumah tangga. Dalam melaksanakan Program Desa Mandiri Energi ini harus memperhatikan beberapa prinsip seperti keamanan dari pemasangan instalasi biogas, harus selalu berfokus pada hasil yang diperoleh, serta mendorong motivasi masyarakat untuk berperan aktif dari program ini. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Inem masyarakat pengguna biogas, menyatakan bahwa :

“kulo nderek manfaatne biogas iki nggih mergo ngertos manfaatne mbak, aku selama gae biogas iki wes jarang tuku gas elpiji dadi yo maleh hemat mbak. Biasane tuku gas semingu pisan iki wes ra tau

tuku gas. (saya ikut memanfaatkan biogas ini karena mengerti manfaat yang diperoleh mbak, saya selama memakai biogas ini sudah jarang beli gas elpiji lagi jadi hemat mba. Biasanya saya membeli gas elpiji seminggu sekali sekarang sudah tidak beli lagi)”.(Wawancara 20 febuari 2018 dirumah ibu Inem)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan biogas sudah sadar akan manfaat yang diperoleh seperti bisa digunakan untuk memasak dan juga sebagai peerangan



Gambar 6. Instalasi Biogas
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2018

Gambar diatas menjelaskan bahwa instalasi biogas dimulai dari pembuangan kotoran sapi yang sudah dikumpulkan, setelah itu di taruh di dalam wadah untuk kemudian di aduk, dan setelah itu dimasukan ke dalam fiber selama 1 hari agar gas yang di peroleh bisa maksimal, kemudian disalurkan ke dalam pipa yang sudah disediakan dan selanjutnya bisa di gunakan untuk memasak dan sebagai penerangan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 7. Manfaat Biogas untuk Penerangan dan memasak
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung sudah dilaksanakan cukup baik dan sudah cukup maksimal dilihat dari masyarakat yang menggunakan biogas ini sudah bisa berdaya dalam memenuhi kebutuhan gas rumah tangga. Dari aspek ekonomi bisa menghemat kebutuhan gas elpiji yang biasa dipakai sehari

hari, serta bisa buat lampu penerangan meskipun tidak bisa 1 rumah. Dari segi lingkungan bisa menjaga kebersihan air bersih dan bisa dijadikan pupuk untuk pertanian, serta dari segi sosial bisa menjaga lingkungan sosial dari bahaya penyakit dari banyaknya limbah kotoran sapi. Diharapkan dengan adanya Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung masyarakat akan lebih banyak yang berpartisipasi untuk dapat mengikuti program tersebut. Karena melihat potensi yang di miliki Desa Mulyosari sangat melimpah untuk pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi berbasis biogas.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah implementasi program, suatu implementasi program tentu saja memiliki faktor pendukung yang membantu terlaksananya implemenmtasi program tersebut. Pada implementasi Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung membutuhkan beberapa faktor pendukung yang akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi suatu program. Berdasarkan hasil penelian, peneliti menemukan beberapa

faktor pendukung yang terdapat dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi. Faktor pendukung tersebut, antara lain :

1) Adanya Sosialisasi

Faktor pendukung implementasi Program Desa Mandiri Energi adalah adanya sosialisasi yang mendalam kepada warga mengenai program tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini warga semakin mengerti manfaat dari limbah kotoran sapi yang bisa dijadikan biogas. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Seperangkat Desa Mulyosari yang juga ikut berperan membantu. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“jadi gini mbak, sebagai faktor pendukung dari program ini salah satunya adalah dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan ke Desa yang dihadiri oleh warga sekitar. Sosialisasi yang kita lakukan itu rutin mbak jadi setiap tahun kita selalu adakan sosialisasi mengenai program ini, dan masyarakat yang hadir juga banyak”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Menurut wawancara diatas, sosialisasi merupakan salah satu faktor pendukung yang dilakukan pemerintah secara rutin setiap tahunnya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“nggih mbak , jadi gini awal sosialisasi itu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menuju ke Desa Mulyosari dan menyampaikan kalau akan ada sosialisasi biogas dan meminta bantuan desa untuk menyebarkan informasi tersebut ke warga. Setelah itu kita dari pihak Desa memberitahukan ke tiap-tiap RT

agar memberitahukan kepada warganya bahwa tanggal sekian akan ada acara tersebut. Dari pihak Desa juga sering mengadakan sosialisasi mengenai program ini mbak, baik sosialisasi secara bersamaan dengan Dinas dan warga ataupun dengan meninjau langsung rumah-rumah warga (*face to face*). (Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Hal tersebut juga diperkuat dengan ungkapkan oleh Salah satu warga yang menggunakan biogas yaitu Ibu Inem masyarakat pengguna biogas, menyatakan bahwa :

“kulo ngertos enten biogas niku saking ketua RT mbak, cirose ketua RT enten Program Desa Mandiri Energi sing nganggo biogas iso damel masak lan gawe lampu. Saklajengnipun kulo derek dateng kantor Desa menawi semerep coro-coro gawe niku (saya tau ada biogas dari ketua RT mbak, katanya ada Program Desa Mandiri Energi dengan biogas yang manfaatnya bisa buat masak dan buat lampu penerangan. Setelah itu saya ikut acara di kantor Desa agar tau cara-cara membuatnya”.(Wawancara pada 20 febuari 2018 dirumah ibu Inem)



Gambar 8. Kegiatan Sosialisasi Biogas di Desa Mulyosari
Sumber :Dokumentasi Sosialisasi Biogas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, kegiatan sosialisasi mengenai Program Desa Mandiri Energi dilakukan secara rutin oleh semua *stakeholder* yang telibat. Dengan adanya sosialisai tersebut diharpkan masyarakat yang belum mengetahui manfaat biogas bisa menjadi tau dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi ini.

2) Adanya Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan suatu program. Dari hasil penelitian dilapangan mengenai Program Desa Mandiri Energi bahwa komunikasi yang dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat di dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi ini sudah cukup baik. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Totok Joko P selaku Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“adanya komunikasi yang baik antara desa dan juga pemerintah daerah ataupun pusat merupakan suatu faktor pendukung dari keberhasilan program DME ini mbak. Karena jika komunikasi tidak berjalan baik otomatis akan menghambat tujuan dari program ini”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komunikasi yang baik antara semua *stakeholder* yang terlibat akan mempermudah atau memperlancar suatu program dalam mencapai tujuan. Dari komunikasi maka akan diketahui mengenai kejelasan dari

program, kecukupan informasi, dan ketepatan dari program. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“iya mbak, informasi yang kita dapat dari dinas seperti kejelasan dari program DME itu, kecukupan dan ketepatan waktu dari program. Jadi saling sinergitas antara dinas dan desa mbak”. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperoleh kepala desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah cukup baik. Adanya hubungan yang saling sinergi antara aktor-aktor tersebut.

3) Ketersediaan Bahan Baku untuk Biogas

Faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan program ini adalah melimpahnya ketersediaan bahan baku kotoran sapi yang digunakan untuk biogas. Di Desa Mulyosari rata-rata ada minimal 2 ekor sapi di setiap rumahnya hal tersebut yang menjadikan Desa Mulyosari di tunjuk sebagai pelaksana program desa mandiri energi. hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari menyatakan bahwa:

“ketersediaan bahan baku untuk biogas atau kotoran sapi disini memang cukup banyak mbak. Karena mayoritas masyarakat disini sebagai peternak sapi jadi hal itu lah yang menjadi nilai tambah pelaksanaan program desa mandiri energi ini berhasil” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kotoran sapi menjadi utama dalam pembuatan biogas oleh karena banyaknya bahan baku di Desa Mulyosari tersebut. Desa Mulyosari ditunjuk untuk melaksanakan program desa mandiri energi yang dibantu oleh masyarakat selaku target group dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pembuatan kebijakan.

b. Faktor Penghambat

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling penting bagi keberhasilan Program Desa Mandiri Energi ini karena target group dari program ini adalah masyarakat Desa Mulyosari. Jadi peran masyarakat sangat berpengaruh pada hasil dari program yang terlaksana. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Bapak Edi Wahyudi selaku Staff di Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat sangat penting lo mbak, karena kan program ini merupakan turunan dari program pemberdayaan masyarakat jadi yang menjadikan program ini berhasil atau tidak salah satunya ya adanya partisipasi masyarakat. Waktu sosialisasi kemarin kita juga berusaha menyadarkan masyarakat mengenai program ini mbak”. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung).

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena merupakan target group dari Program Desa Mandiri Energi. Hal tersebut

diperkuat dengan ungkapan Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“masih kurang mbak, dilihat saja kan di Desa Mulyosari ada 1688 KK tapi yang ikut berpartisipasi masih sekitar 100 KK jadi masih sangat banyak masyarakat yang belum berpartisipasi”. (Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat yang merupakan aspek penting dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya peran serta masyarakat untuk mengikuti program dari biogas ini. Oleh sebab itu pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi ini masih terhambat. Karena program ini masih dirasa baru oleh masyarakat jadi masyarakat masih berfikir-fikir untuk ikut berparsipasi dari program ini mengingat masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai biogas. Seharusnya hal ini tidak boleh berkepanjangan karena manfaat yang diperoleh dari biogas juga sangat berpengaruh baik dari aspek ekonomi, sosial ataupun dari lingkungan.

2) Ketersediaan alat yang digunakan dalam pembuatan instalasi biogas

Mengenai ketersediaan alat yang digunakan dalam pelaksanaan program desa mandiri energi berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyosari masih sangat terbatas. Dengan keadaan yang seperti ini tentunya pelaksanaan juga memakan waktu yang relatif lama. Hal serupa

juga di sampaikan oleh Bapak Agil Bapak Agil Wauisan selaku Kepala Desa Mulyosari, menyatakan bahwa :

“alat yang dibutuhkan untuk pembuatan unit biogas disini masih terbatas mbak, sehingga banyak memakan waktu dan biaya. Karena disini masih banyak yang menggunakan unit biogas dengan beton bukan dari fiber dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Seperti adonan semen masih dengan cara-cara tradisional tanpa menggunakan molen hal itulah yang membuat lama, seharusnya dengan menggunakan molen bisa selesai 2-3 hari tapi karena keterbatasan alat jadi bisa mundur sampai 1 minggu”. (Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2018 di Kantor Desa Mulyosari)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemunduran waktu yang tidak sesuai rencana akan menambah pengeluaran yang tidak terduga. Mereka tidak menyadari bahwa alat yang digunakan masih sangat terbatas. Oleh karena itulah, para pelaksana program desa mandiri energi harus menyadari bahwa peralatan yang modern sangat diperlukan dalam pembuatan biogas agar sesuai dengan petunjuk teknis dan non teknis.

E. Pembahasan

1. Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh para pembuatan kebijakan agar terlaksananya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut W.I Jenkins (1978) dalam Wahab (2012:14) bahwa kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik, yang berkenaan dengan tujuan

yang telah ditetapkan dan cara-cara mencapainya dalam suatu situasi. Dalam mengimplementasi kebijakan didalamnya termuat program-program yang telah dibuat pemerintah. Menurut Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003:9) implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dengan cara mengorganisir, menginterpretasi, dan menerapkan kebijakan.

Dari teori diatas tentang berbagai pertimbangan mengenai cara untuk mengimplementasikan kebijakan maka dengan cara meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada oleh sebab itu dibuatlah Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, yang diatur dalam RPJMD 2014-2018 Kabupaten Tulungagung tentang program prioritas, kemudian di turunkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018, Serta didukung dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa Mulyosari setiap tahunnya. program Desa Mandiri Energi pada Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.24/397/013/2013 bahwa telah ditetapkan lokasi pilot project Desa Mandiri Energi Tahun 2014 di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Penetapan lokasi program didasarkan pada a) potensi sumber bahan baku (kotoran ternak) untuk pengembangan biogas sangat tinggi, b) tersedianya lahan yang cukup untuk pembuatan instalasi biogas, c) kebutuhan masyarakat akan biogas sangat tinggi, d) 110 KK

sangat miskin, 321 KK miskin, dan 153 KK hampir miskin, e) merupakan daerah terpencil dan termasuk wilayah tertinggal yang jauh dari pusat kota Tulungagung. Menurut Freedman dalam Charles O. Jones (1991: 296) ada pilar aktivitas dalam mengoprasikan program yaitu :

- 1) Organisasi
- 2) Interpretasi
- 3) Aplikasi

Ketika pilar menurut Chrales O. Jones tersebut merupakan tiga pilar penting dalam implementasi program, untuk itu ketiga pilar tersebut harus diperlukan sebelum tahap implementasi. Implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat telah mencakup ketiga pilar disampaikan oleh Charles O. Jones.

a. Organisasi

Menurut Charles O. Jones (1991:296) didalam aktivitas organisasi merupakan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dari teori tersebut maka dalam aktivitas organisasi memerlukan struktur organisasi yang jelas, sumberdaya pelaksana dan juga keterlibatan dari OPD terkait. Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam implementasi program, dimana sumber daya dan keterkaitan antara OPD merupakan salah satu yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu implementasi program agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan

hasil penemuan dilapangan, peneliti menemukan hal yang menyangkut organisasi bahwa struktur organisasi Program Desa Mandiri Energi masih menggunakan struktur organisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan Perbub Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya struktur organisasi tersebut dilakukan untuk mencari dan menetapkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menjalankan Program Desa Mandiri Energi.

Selain dengan adanya struktur organisasi dan penetapan sumberdaya manusia yaitu keterkaitan antara OPD sangat diperlukan agar implementasi program berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Apa yang telah dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991:296) tersebut peneliti melihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung sebagai pembuat kebijakan telah memilih sumberdaya yang berkualitas untuk melaksanakan program, serta menentukan OPD yang terlibat berguna untuk hubungan dalam memberdayakan masyarakat sekitar Desa Mulyosari. Sesuai dengan adanya struktur organisasi, sumberdaya yang berkualitas, dan OPD yang terkait semua itu merupakan tahap organisasi yang bertujuan agar Program Desa Mandiri Energi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan.

Begitu pula dengan pendapat Jones (1996) tentang implementasi program kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang telah didapat dan dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya merupakan adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi, batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumberdaya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah perubahan yang kecil ataupun besar yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Menurut hasil penelitian didapatkan bahwa sumberdaya yang berkualitas sangat mempengaruhi terlaksananya Program Desa Mandiri Energi ini. Tidak hanya sumberdaya saja, tetapi di Desa Mulyosari sangat membutuhkan dana untuk membuat instalasi biogas. Dengan adanya sumberdaya dan kelengkapan tersebut, dapat mempengaruhi berjalannya suatu implementasi Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari.

Berdasarkan hasil didapatkan bahwa organisasi sudah dilakukan cukup maksimal, dapat dilihat dari adanya struktur organisasi yang jelas sesuai dengan bidang-bidang yang dimilikinya. Selain itu keterlibatan OPD antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Desa Mulyosari sudah dilakukan dengan baik dapat dilihat dari komunikasi yang berjalan selama program itu mulai diimplementasikan sampai sekarang. Selanjutnya sumberdaya yang dimiliki dari implementasi program sudah dipilih sesuai dengan kebutuhan dari program desa mandiri energi berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Interpretasi

Menurut Freedman dalam Charles o. Jones (1991:296) bahwa interpretasi menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Interpretasi merupakan tahap dimana para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti menemukan pada tahap ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mengenalkan kebijakan yang telah dibuat yaitu mengadakan sosialisasi, aplikasi, monitoring, evaluasi, membuat laporan, dan menyusun laporan. Hal tersebut telah sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ada.

Konsep awal dari program desa mandiri energi berawal dari pendekatan secara hybrid model atau pendekatan kombinasi dari top-down dengan bottom-up artinya kebijakan dibuat secara partisipatif antara pembuat kebijakan top-down (pemerintah kabupaten) dengan bottom-up (pemerintah desa) hal tersebut sesuai dengan teori Peter deLeon dan Linda deLeon (2001). Proses interpretasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulunggaung bertujuan untuk mencapai kesesuaian antara pembuat kebijakan dan para pelaksana kegiatan. Berdasarkan kesimpulan dari teori Siagian (2001) tentang pembangunan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan

dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak. Dari teori tersebut menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan dalam bentuk Program Desa Mandiri Energi sudah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat masih kurang berpartisipasi untuk mengikuti program desa mandiri energi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya energi berkelanjutan.

Menurut teori Winarno (2014) mengatakan bahwa implementasi merupakan bentuk suatu kegiatan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. peneliti menemukan hasil dilapangan Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari sudah terealisasi seperti 102 KK sudah memanfaatkan biogas. Program Desa Mandiri Energi merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa secara mandiri atau berdaya dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu pula dengan para pelaksana teknis sudah mampu menjalankan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Para pelaksana sudah mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan

pelaksanaan program, bisa dikatakan sudah sesuai dengan pedoman yang telah disusun. Para pelaksana mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam suatu keberhasilan program.

c. Aplikasi

Tahapan pilar ketiga menurut Freedman dalam Charles O.Jones (1991:296) adalah Aplikasi atau penerapan bahwa merupakan ketentuan rutin dari pelayanan. Dimana aplikasi disini merupakan pelaksanaan dari program yang telah dibuat. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi di Desa Mulyosari Kabupaten Tulungagung. Dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, mengurangi kemiskinan,serta menjaga lingkungan sekitar. Dengan cara memanfaatkan sumber daya kotoran sapi yang selanjutnya digunakan sebagai biogas. Aplikasi Program Desa Mandiri Energi dilapangan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat pengguna biogas seperti dengan adanya biogas masyarakat sudah tidak lagi membeli gas elpiji dan juga bisa dijadikan penerangan. Saat ini Program Desa Mandiri Energi sudah mampu mengajak 102 KK yang didukung dengan penggunaan dana desa serta bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Soetarto dalam Abu Huraerah (2008), menyatakan bahwa pemberdayaan ada 2 pengertian yaitu : Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat dan Pemanfaatan sumber

masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya. Hasil penelitian dari teori tersebut menyatakan bahwa, kemampuan yang dimiliki oleh semua *stakeholder* yang terlibat sudah dikeluarkan mulai dari memberikan motivasi kepada masyarakat serta berusaha dalam mensejahterakan warganya. Bukan hanya itu pemanfaatan sumberdaya dalam program ini juga sudah ditingkatkan mulai dari informasi, lingkungan pengembangan program.

Dari teori tersebut peneliti menemukan hasil dilapangan bahwa pemerintah daerah sangat berperan aktif atas keberhasilan Program Desa Mandiri Energi ini. Serta tidak lepas dari peran serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dari program tersebut. Oleh karena itu Program Desa Mandiri Energi di Desa Mulyosari Kabupaten Tulungagung masih terus dikembangkan guna mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Adanya *output* dan *outcome* maka diharapkan program DME/BEP akan mempunyai dampak (*impact*) positif dalam hal :

- a) Tersedianya energi untuk rumah tangga, b) Berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap bahan energi konvensional, c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, d) Kelestarian sumber daya dan lingkungan. Melihat teori output dan outcome tersebut pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi sudah mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat pengguna biogas seperti tidak lagi membeli gas elpiji dan dapat digunakan sebagai penerangan. Oleh

sebab itu, pelaksanaan Program Desa Mandiri di Desa Mulyosari sudah berjalan dengan baik dan sudah cukup maksimal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

a. Faktor Pendukung

1) Adanya Sosialisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Desa Mulyosari mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Mulyosari dengan tujuan masyarakat bisa memahami akan manfaat dari biogas. Hal ini sesuai dengan pendapat Brian W. Hogwood dan Lewia A.Gun yang di kutip Wahab (1997) ada salah satu syarat dalam pengimplementasian kebijakan yaitu pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Sosialisasi yang dilakukan mulai dari pemerintah desa dan juga dari masyarakat langsung yang dilakukan rutin setiap tahunnya.

Menurut George Edward III dalam Budi Winarno (2002: 126-151) ada faktor pendukung keberhasilan suatu kebijakan salah satunya adalah strukur organisasi. Dari teori itulah Dinas Pemberdayaan dan Desa, dan Desa Mulyosari bekerjasama untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Mulyoari. Sosialisai yang dilakukan sudah cukup baik dan sosialisasi

dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat atau dengan cara face to face agar lebih mendalam.

2) Adanya komunikasi

Dukungan selanjutnya dari implementasi program Desa Mandiri Energi adalah komunikasi yang baik antara stakeholder yang terlibat. Hal tersebut sesuai dengan teori kebijakan dari George Edward yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:126-151) faktor pendukung implementasi salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi baik dalam proses transmisi, konsistensi, dan kejelasan dari suatu program. Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemerintah Desa Mulyosari sudah cukup maksimal mulai dari kejelasan dari program desa mandiri seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, ketepatan waktu dalam pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang telah ditentukan serta konsistensi dari program sudah cukup baik.

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997) ada beberapa syarat tabf membuat suatu kebijakan terimplementasi dengan baik, salah satunya adalah Konunikasi dan koordinasi yang sempurna. Berdasarkan hasil dilapangan bahwa komunikasi serta koordinasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

Desa Mulyosari sudah cukup baik dan bisa di pertanggungjawabkan pada setiap keputusan yang buatnya.

3) Adanya bahan baku yang melimpah

Bahan baku kotoran sapi merupakan bahan utama dalam pembuatan biogas. Di Desa Mulyosari mayoritas masyarakatnya sebagai peternak sapi dimana setiap rumahnya minimal memiliki 2 ekor sapi, sehingga sangat wajar bila Desa Mulyosari menjadi Desa yang menjalankan program desa mandiri energi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat George Edward yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:126-151) salah satunya adalah sumber-sumber pendukung dalam implementasi kebijakan untuk menunjang keberhasilan dari kebijakan.

Berdasarkan hasil dilapangan bahwa sumber-sumber pendukung yang dimiliki dari Desa Mulyosari adalah bahan baku yaitu kotoran sapi yang cukup melimpah dan bahan baku tersebut sudah cukup banyak digunakan dalam keberhasilan pembuatan biogas. sampai saat ini sudah memanfaatkan 326 ekor sapi. Tetapi dari hasil tersebut masih belum digunakan secara maksimal dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikutsertakan dalam pelaksanaan program desa mandiri energi berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Penghambat**1) Partisipasi masyarakat**

Pemahaman atau pengetahuan masyarakat mengenai isi dari pelaksanaan program sangat diperlukan. Hal tersebut perlu karena target group dari program itu sendiri adalah masyarakat Desa Mulyosari. Menurut Soekarno (2003) adanya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah adanya kekurangan akan tersediaan sumber-sumber pembantu seperti sumber daya manusia.

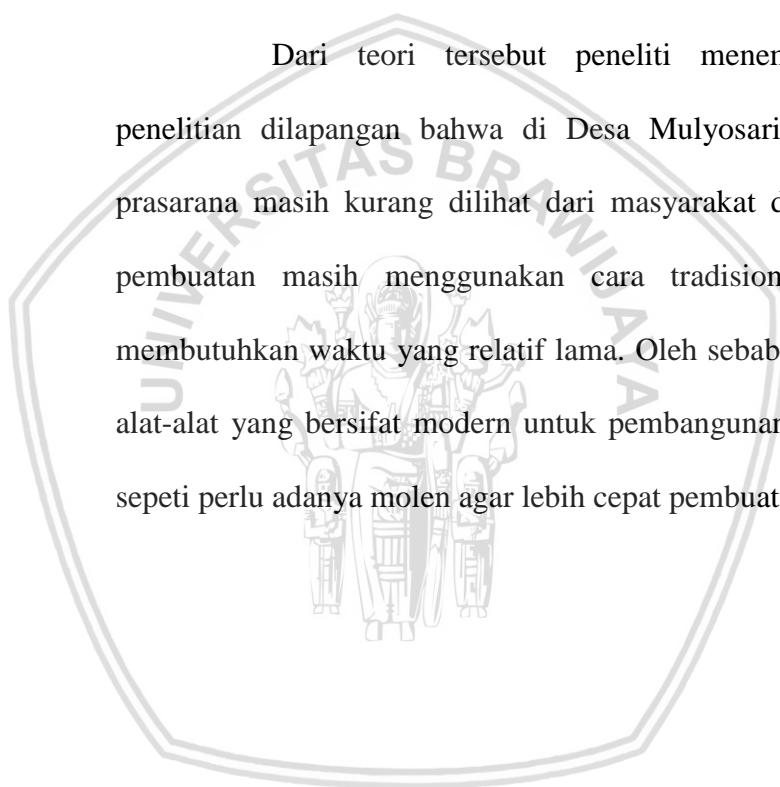
Dari teori tersebut peneliti menemukan hasil penelitian lapangan bahwa, masih kurangnya sumber daya manusia mengenai pemahaman dari masyarakat tentang energi berkelanjutan. Kebanyakan masyarakat Desa Mulyosari masih belum memahami akan manfaat dari biogas. Oleh sebab itu, masih perlu adanya penyuluhan agar masyarakat paham tentang biogas. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tersebut yang menjadikan partisipasi masyarakat masih kurang, hal ini yang membuat pelaksanaan program desa mandiri energi menjadi terhambat dan dirasa masih kurang maksimal.

2) Kurangnya kesediaan alat untuk pembuatan unit biogas.

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kesediaan alat dalam pembuatan unit biogas. Dengan alat yang memadai

maka pembuatan unit biogas akan cukup maksimal dan bisa lebih cepat dalam proses pembuatannya. Menurut Soekarno (2003) adanya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah adanya kekurangan akan tersediaan sumber-sumber pembantu seperti sarana dan prasarana.

Dari teori tersebut peneliti menemukan hasil penelitian lapangan bahwa di Desa Mulyosari sarana dan prasarana masih kurang dilihat dari masyarakat dalam proses pembuatan masih menggunakan cara tradisional sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh sebab itu perlunya alat-alat yang bersifat modern untuk pembangunan unit biogas seperti perlu adanya molen agar lebih cepat pembuatannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan terkait Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat, maka kesimpulan peneliti bahwa pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi cukup berhasil. Adapun implementasi dan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

1. Implementasi Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat.

- a. Organisasi

Struktur organisasi sudah sesuai dengan Tupoksi ada dan aktor-aktor yang terlibat di dalam implementasi Program Desa Mandiri Energi sudah mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan Program Desa Mandiri Energi.

- b. Interpretasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan Program Desa Mandiri Energi sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di harapkan serta sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.

- c. Aplikasi

Pada tahap penerapan Program Desa Mandiri Energi ini sudah cukup berhasil karena dalam kurun waktu 4 tahun sudah mampu mengajak 102 KK untuk menggunakan biogas. Biogasi digunakan masyarakat sebagai memasak dan penerangan. Serta dalam implementasi nya bisa berjalan dengan lancar, baik bagi masyarakat sebagai target group, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Desa Mulyosari sebagai aktor pelaksanaan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyosari adalah adanya sosialisasi, komunikasi, dan bahan baku yang melimpah.

b. Faktor Penghambat

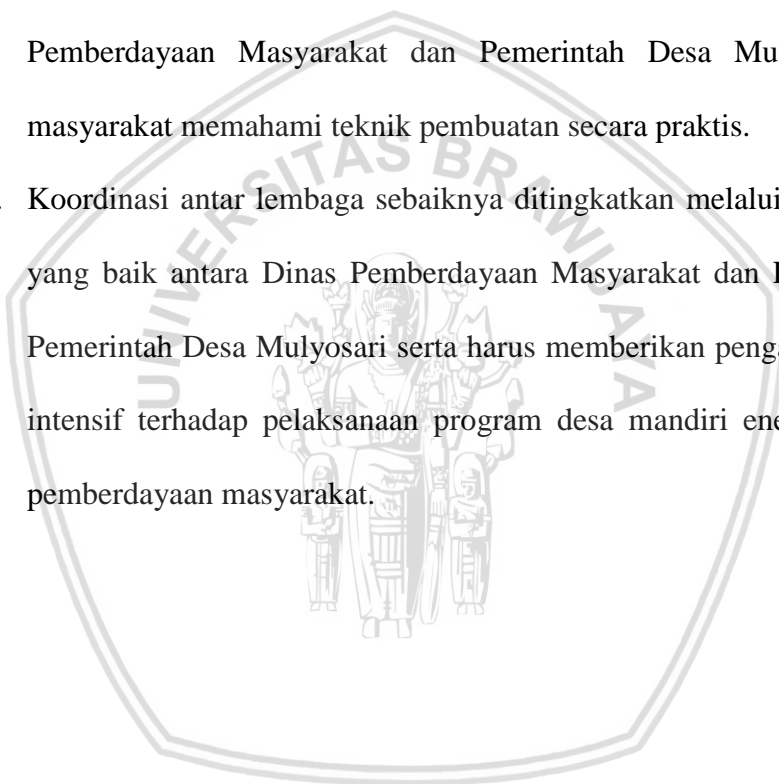
Faktor penghambat dari Program Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyosari adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesediaan alat untuk pembuatan unit biogas.

B. Saran

1. Agar partisipasi masyarakat meningkat pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama dengan Pemerintah Desa Mulyosari harus lebih memberikan pengarahan

kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan terkait pengetahuan tentang program desa mandiri energi berbasis biogas, agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa mandiri energi.

2. Agar pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan biogas meningkat maka perlu adanya pelatihan secara langsung dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Mulyosari agar masyarakat memahami teknik pembuatan secara praktis.
3. Koordinasi antar lembaga sebaiknya ditingkatkan melalui komunikasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Pemerintah Desa Mulyosari serta harus memberikan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan program desa mandiri energi berbasis pemberdayaan masyarakat.



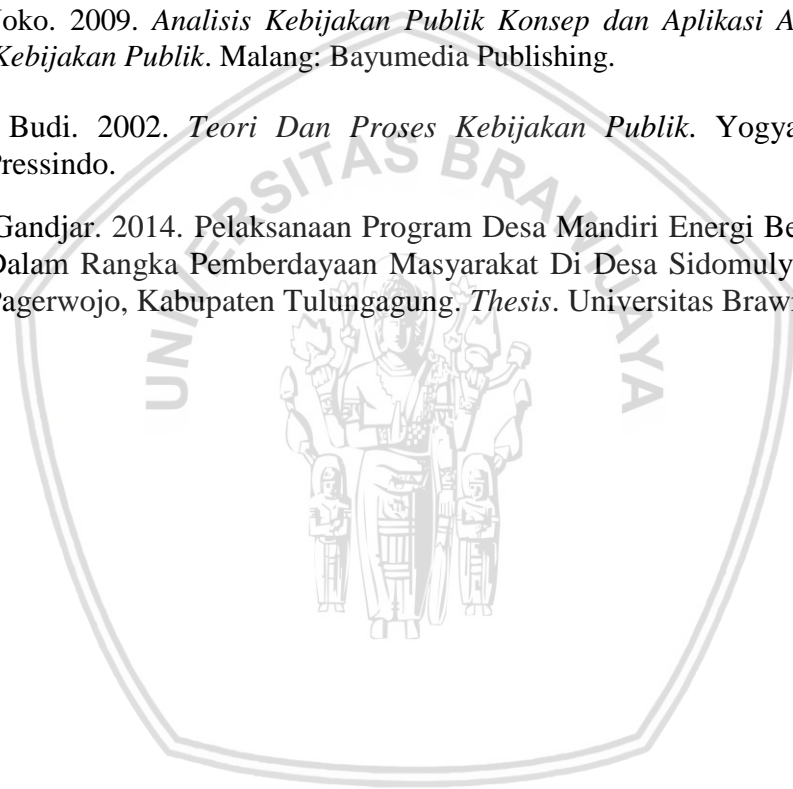
DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Ashari. Rizky A. 2017. Implementasi Program Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Daniel, Andre. 2006. Konsep desa mandiri energi. Diakses pada 01 Desember 2017 melalui https://www.academia.edu/4211326/KONSEP_DESA_MANDIRI_ENERGI
- Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. 2014. *Laporan Dewan Energi Nasional*. Diakses pada 1 September 2017 dari www.den.go.id/
- Fatima, Khoirul. 2016. Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Berbasis Sustainable Development. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia
- Mahardika. 2014. Bab III Pendekatan dan teori-teori implementasi kebijakan publik. Diakses pada tanggal 01 Desember 2017 dari https://www.academia.edu/10123441/BAB_III_PENDEKATAN_DAN_TEORI_TEORI_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK

- Mardikanto, T, and Soebiato, P. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mediastika, Christina E. 2013. *Hemat Energi Dan Lestari Lingkungan Melalui Bangunan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mentari, Tiara. 2014. Partisipasi masyarakat melalui dalam program desa mandiri energi di Desa Kujau Kecamatan Batayau Kabupaten Tana Tindung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. ISSN 2338-3651.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kajian pengembangan sumber daya energi alternatif tertentu di Jawa Timur. Diakses pada tanggal 03 September 2017 dari <http://jdih.jatimprov.go.id/>
- Permen ESDM 23 2013. Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 32 tahun 2008 tentang penyediaan ,pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar, Diakses pada tanggal 03 September 2017 dari <http://jdih.esdm.go.id/peraturan/PERMEN%20ESDM%2025%202013.pdf>
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
- Permen PDPT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- Persons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori & praktik analisis kebijakan publik*. Jakarta: Kencana.
- Pratiwi, Grace YE. 2015. Implementasi Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Mulyosari Tahun 2018.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018.

- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset*. Yogyakarta: Andi Offset
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Askara.
- Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan Dan Model- Model Pemberdayaan*, Jogjakarta: Gaya Media.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI-Press.
- Tulungagung.go.id. 2016. Keberhasilan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas. Diakses pada tanggal 3 Desember 2017 dari <http://tulungagung.go.id>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Diakses pada tanggal 03 September 2017 dari http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_30.pdf
- Wahab, Solichin Abd. 2001. *Analisis kebijakan dari formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

- Wahab, Solichin Abd. 2012. *Analisis kebijakan dari formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widaningsih, Wiwien. 2014. Partisipasi Masyarakat Melalui Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Limbah Ternak Sapi di Desa Haurngambong Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik*. 11(01). 28-51.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiyono, Gandjar. 2014. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. *Thesis*. Universitas Brawijaya. Malang



Lampiran 1. Interview Guide

| NO | FOKUS | PERTANYAAN | INFORMAN | DATA SEKUNDER |
|----|--------------|---|--|--|
| 1 | Organisasi | 1. Bagaimana struktur organisasi dalam implementasi program desa mandiri energi di Desa Mulyosari? 2. Bagaimana hubungan antar organisasi atau OPD terkait ? 3. Bagaimana koordinasi dari lintas organisasi selama ini ? 4. Bagaimana ketersediaan SDM dalam melaksanakan program Desa Mandiri Energi? | 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapak Totok Joko) 2. Staff Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapak Edi Wahyudi) | 1. RPJMD Tahun 2014-2018 Kabupaten Tulungagung 2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018 3. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Desa Mulyosari Tahun 2016 4. RKP Desa Mulyosari Tahun 2018 |
| 2 | Interpretasi | 5. Bagaimana konsep awal program desa mandiri energi dibuat ? 6. Bagaimana bentuk, tujuan, dan sasaran program desa mandiri energi di Desa Mulyosari ? 7. Bagaimana sosialisasi ke pelaksana program ? 8. Apakah para pelaksana sudah mampu menjalankan program tersebut sesuai dengan petunjuk teknis atau sudah sesuai dengan pedoman yang ada ? 9. Apakah tujuan yang sudah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diinginkan ? | 3. Kepala Desa Mulyosari (Bapak Agil Wauisan) 4. Masyarakat Pengguna Biogas (Ibu Inem) 5. Masyarakat Pengguna Biogas (Ibu Tukin) | |
| 3 | Aplikasi | 10. Bagaimana persiapan awal saat program | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | <p>tersebut mulai di implementasikan ?</p> <p>11. Apakah ada pembuatan tahapan-tahapan kerja yang jelas agar program desa mandiri energi berjalan sesuai dengan target atau SOP yang telah di tentukan ?</p> <p>12. Bagaimana realisasi dilapangan selama program desa mandiri energi mulai diluncurkan sampai sekarang ?</p> <p>13. Selama menjalankan program desa mandiri energi apakah sudah memenuhi aspek pemberdayaan masyarakat ?</p> | | |
| 4 | Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat | <p>14. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat implementasi program desa mandiri energi di desa mulyosari ?</p> <p>15. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi program desa mandiri energi di desa mulyosari ?</p> | | |

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Yos Sudarso III/7 Telp. (0355) 320726-327556

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Nomor : 072/466.5/601/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/
Pengambilan Data

Tulungagung, 15 Februari 2018

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kadis PMD Kab. Tulungagung
2. Kadisnak dan Keswan Kab.
Tulungagung
3. Ka BPS Kab. Tulungagung
4. Camat Pagerwojo
Di

TULUNGAGUNG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Tanggal : 12 Februari 2018
Nomor : 2103/UN10.F03.IT.11/PP/2018
Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : YUNIA DANIATI
Alamat : Ds. Pucangan, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung
Kebangsaan : Indonesia
Yang bersangkutan diberikan Rekomendasi untuk Ijin survey/Observasi/Pengambilan Data:
Judul/Data/Proposal : "Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat"
Pengikut : -
Waktu : 2 (Dua) Bulan Terhitung Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan
Lokasi : 1. DPMD Kab. Tulungagung
2. Disnak dan Keswan Kab. Tulungagung
3. BPS Kab. Tulungagung
4. Ds. Mulyosari, Kec. Pagerwojo, Kab. Tulungagung
Ketentuan : 1. Pemohon ijin Penelitian /Pengambilan Data wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.
2. Pelaksanaan ijin Penelitian /Pengambilan Data agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai melaksanakan ijin Penelitian/Pengambilan Data harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung
4. Apabila tidak melaporkan hasil ijin Penelitian /Pengambilan Data maka Bakesbang Pol Kabupaten Tulungagung akan mengirim surat kepada yang bertanggung jawab pada acara tersebut dan cacat hukum
5. Permohonan ijin Penelitian /Pengambilan Data hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya (tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya)
6. Pemohon ijin Penelitian /Pengambilan Data tetap berpedoman dan menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi Ijin Penelitian disampaikan, mohon di fasilitasi sesuai kebutuhan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Handwritten signature
Jr. ANDRI MAGIONO
Kepala Tingkat I
NIP. 19600910 199203 1 005

Tembusan:

- Yth. 1. Sdr. Dandim 0807 / Pasi I Tulungagung
2. Sdr. Kapolres/Kasat Intelkam Tulungagung
3. Sdr. Ka Bappeda Kab. Tulungagung
4. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Sdr. Yang Bersangkutan

**Lampiran 3. Surat Riset/Survey untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Bakesbangpol) Tulungagung**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 2103 /UN10.F03.11.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jl. Yos Sudarso III/7
Tulungagung

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Yunia Daniati
Alamat : RT 05 RW 03 Dusun Sanan, Desa Pucangan, Kecamatan Kauman
Tulungagung
NIM : 145030101111115
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Implementasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Lamanya : 2 (dua) bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 12 Februari 2018

Mengetahui,
an Dekan
Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
2. Yth. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung
3. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

M : 08

Lampiran 4. Curriculum Vitae**CURRICULUM VITAE****DATA DIRI**

Nama : Yunia Daniati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl/Lahir : Tulungagung, 24 Juni 1996
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Sanan RT 05 RW 03 Ds. Pucangan Kec. Kauman
Kab. Tulungagung
Email : yuniadaniati96@gmail.com
Ho. Hp : 085655629525

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Pucangan 2, Tulungagung 2002-2008
2. SMPN 2 Kauman, Tulungagung 2008-2011
3. SMAN 1 Kauman, Tulungagung 2011-2014
4. Universitas Brawijaya, Malang 2014-2018

Lampiran 5. Data Pengguna Biogas Desa Mulyosari

| NO | NAMA | DUSUN | RT/RW |
|----|----------|-----------|-------|
| 1 | Suwito | Pabyongan | 01/01 |
| 2 | Yarni | Pabyongan | 01/01 |
| 3 | Barlah | Pabyongan | 01/01 |
| 4 | Wito | Pabyongan | 01/01 |
| 5 | Ijah | Pabyongan | 01/01 |
| 6 | Sutrisno | Pabyongan | 02/01 |
| 7 | Yanah | Pabyongan | 02/01 |
| 8 | Gono | Pabyongan | 02/01 |
| 9 | Yakim | Pabyongan | 03/01 |
| 10 | Slamet | Pabyongan | 03/01 |
| 11 | Wiwik | Pabyongan | 03/01 |
| 12 | Narseh | Pabyongan | 03/01 |
| 13 | Jamus | Pabyongan | 03/01 |
| 14 | Tulik | Pabyongan | 03/01 |
| 15 | Wiji | Pabyongan | 03/01 |
| 16 | Sinto | Pabyongan | 03/01 |
| 17 | Slamet | Pabyongan | 04/01 |
| 18 | Sakur | Pabyongan | 01/02 |
| 19 | Suprih | Pabyongan | 01/02 |
| 20 | Yanah | Pabyongan | 02/02 |
| 21 | Jinah | Pabyongan | 02/02 |
| 22 | Agil | Pabyongan | 02/02 |
| 23 | Kipan | Pabyongan | 02/02 |
| 24 | Warti | Pabyongan | 02/02 |
| 25 | Katemi | Pabyongan | 02/02 |
| 26 | Kartini | Pabyongan | 03/02 |
| 27 | Toni | Pabyongan | 03/02 |
| 28 | Peno | Pabyongan | 03/02 |
| 29 | Alim | Pabyongan | 03/02 |
| 30 | Lumoyo | Pabyongan | 01/03 |
| 31 | Bani | Pabyongan | 01/03 |
| 32 | Wugu | Pabyongan | 01/03 |
| 33 | Yasin | Pabyongan | 01/03 |
| 34 | Tamban | Pabyongan | 01/03 |
| 35 | Tarni | Pabyongan | 02/03 |
| 36 | Samiran | Pabyongan | 03/03 |
| 37 | Aldo | Pabyongan | 03/03 |
| 38 | Miswanto | Pabyongan | 03/03 |
| 39 | Umar | Pabyongan | 03/03 |
| 40 | Wito | Pabyongan | 03/03 |
| 41 | Muhammad | Pabyongan | 03/03 |

| | | | |
|----|---------|-----------|---------|
| 42 | Hadi | Pabyongan | 03/03 |
| 43 | Turni | Pabyongan | 03/03 |
| 44 | Kamis | Bantengan | 01/04 A |
| 45 | Tukin | Bantengan | 02/04 A |
| 46 | Nur | Bantengan | 02/04 A |
| 47 | Samiran | Bantengan | 02/04 A |
| 48 | Rudi | Bantengan | 02/04 A |
| 49 | Wijaya | Bantengan | 02/04 B |
| 50 | Dian | Bantengan | 02/04 B |
| 51 | Tukris | Bantengan | 02/04 B |
| 52 | Wagiran | Bantengan | 02/04 B |
| 53 | Kabul | Bantengan | 02/04 C |
| 54 | Aan | Bantengan | 01/05 A |
| 55 | Bani | Bantengan | 01/05 A |
| 56 | Mar | Bantengan | 01/05 A |
| 57 | Gales | Bantengan | 01/05 A |
| 58 | Sri | Bantengan | 01/05 A |
| 59 | Supani | Bantengan | 01/05 B |
| 60 | Susanti | Bantengan | 02/05 A |
| 61 | Lia | Bantengan | 02/05 B |
| 62 | Yasir | Bantengan | 03/05 A |
| 63 | Dwi | Bantengan | 03/05 A |
| 64 | Pratama | Bantengan | 03/05 A |
| 65 | Yasin | Bantengan | 03/05 B |
| 66 | Suyoto | Bantengan | 03/05 B |
| 67 | Lufian | Bantengan | 03/05 B |
| 68 | Satria | Bantengan | 03/05 B |
| 69 | Nuh | Bringin | 01/06 |
| 70 | Bambang | Bringin | 01/06 |
| 71 | Yuda | Bringin | 01/06 |
| 72 | Siti | Bringin | 01/06 |
| 73 | Herdi | Bringin | 01/06 |
| 74 | Fahil | Bringin | 01/06 |
| 75 | Karji | Bringin | 02/06 |
| 76 | Rebo | Bringin | 02/06 |
| 77 | Deni | Bringin | 02/06 |
| 78 | Kanan | Bringin | 02/06 |
| 79 | Ma'ruf | Bringin | 02/06 |
| 80 | Sinto | Bringin | 03/06 |
| 81 | Mu'ani | Bringin | 03/06 |
| 82 | Lia | Bringin | 04/06 |
| 83 | Giran | Bringin | 04/06 |
| 84 | Slamet | Bringin | 04/06 |
| 85 | Sukardi | Bringin | 05/06 |

| | | | |
|-----|----------|---------|-------|
| 86 | Robert | Bringin | 05/06 |
| 87 | Muhammad | Bringin | 05/06 |
| 88 | Fitri | Bringin | 05/06 |
| 89 | Esmi | Bringin | 01/07 |
| 90 | Tejo | Bringin | 01/07 |
| 91 | Tadi | Bringin | 01/07 |
| 92 | Wugu | Bringin | 02/07 |
| 93 | Sampun | Bringin | 02/07 |
| 94 | Yono | Bringin | 02/07 |
| 95 | Aris | Bringin | 02/07 |
| 96 | Mualim | Bringin | 02/07 |
| 97 | Slamet | Bringin | 03/07 |
| 98 | Sutarni | Bringin | 03/07 |
| 99 | Gono | Bringin | 03/07 |
| 100 | Pani | Bringin | 03/07 |
| 101 | Hardi | Bringin | 03/07 |
| 102 | Alfi | Bringin | 03/07 |

Sumber: Data pengguna biogas Desa Mulyosari Tahun 2017

